



SALINAN

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 22 TAHUN 2019

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG RENCANA INDUK *SMART CITY*
KABUPATEN SUKOHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa *smart city* merupakan konsep pengelolaan sistem pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif, efisien dan akuntabel untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. bahwa setiap program dan kegiatan dirumuskan secara komprehensif dan terintegrasi agar dapat meningkatkan fungsi pemerintah dalam pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, pendidikan, kesehatan, kemiskinan, kebudayaan dan peningkatan Sumber Daya Manusia agar mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan hasil pendampingan Gerakan Menuju 100 *Smart City* oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika perlu mengubah Lampiran Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Induk *Smart City* Kabupaten Sukoharjo;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Induk *Smart City* Kabupaten Sukoharjo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
12. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Induk *Smart City* Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA INDUK *SMART CITY* KABUPATEN SUKOHARJO.

Pasal I

Ketentuan Pasal 5 dalam Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Induk *Smart City* Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Rencana Induk *smart city* Kabupaten Sukoharjo disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. pendahuluan;
 - b. visi *smart city* Kabupaten Sukoharjo;
 - c. strategi pembangunan *smart city* Kabupaten Sukoharjo;
 - d. rencana aksi *smart city* Kabupaten Sukoharjo;

- e. peta jalan pembangunan *smart city* Kabupaten Sukoharjo; dan
 - f. penutup.
- (2) Sistematika Rencana Induk *smart city* Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo,
pada tanggal 8 April 2019
BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 8 April 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

AGUS SANTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2019 NOMOR 22

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
 NOMOR 22 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 BUPATI SUKOHARJO NOMOR 3
 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA
 INDUK *SMART CITY* KABUPATEN
 SUKOHARJO.

RENCANA INDUK *SMART CITY* KABUPATEN SUKOHARJO

BAB I

PENDAHULUAN

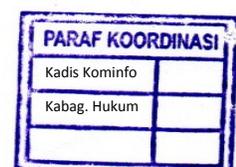
1.1 Latar Belakang

Kabupaten Sukoharjo merupakan kabupaten terkecil kedua di Provinsi Jawa Tengah yang berdiri pada tanggal 15 Juli 1946 berdasarkan :

1. Penetapan Pemerintah Nomor: 16/SD.
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Sukoharjo No. 17 tahun 1986 tentang Hari Lahir Kabupaten Sukoharjo, yang disahkan dengan SK Gubernur KDH Tingkat I Jawa Tengah tanggal 15 Desember 1986 No. 188.3/480/1986 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dati II Sukoharjo No. 3 Tahun 1987 Seri D No.2 tanggal 9 Januari 1987.

Secara geografis, terletak diantara Bagian ujung timur 110. 57° BT, Bagian Ujung Sebelah Barat 11° 42° BT, Bagian Ujung Sebelah Utara 7.32° LS, Bagian Ujung Sebelah Utara 7.49° 32.00° LS. Dengan luas 46,666 km², atau 1,43% luas wilayah Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Sukoharjo memiliki batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut :

Sebelah Utara	:	Kota Surakarta dan Kabupaten Karanganyar
Sebelah Selatan	:	Kabupaten Gunung Kidul (DIY) dan Kabupaten Wonogiri
Sebelah Barat	:	Kabupaten Karanganyar
Sebelah Timur	:	Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Klaten

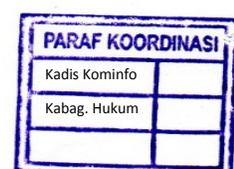


Secara topografi terdiri atas daerah, dataran rendah dan perbukitan. Daerah dataran rendah merupakan kawasan di bagian Utara, daerah perbukitan merupakan kawasan di bagian Selatan dan Timur.

Pola tata guna lahan terdiri dari perumahan, tegalan, kebun campuran, sawah, perusahaan, jasa, industri dan penggunaan lainnya dengan sebaran sawah sebesar 43,97 %, dan lahan bukan sawah 56,03%, dari lahan sawah tersebut terdiri dari 70,94% irigasi teknis, irigasi setengah teknis 10,53%, irigasi sederhana 8,94% dan sawah tadah hujan 8,94 %.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031, Kabupaten Sukoharjo mempunyai tujuan penataan ruang yaitu mewujudkan Kabupaten yang bertumpu pada sektor pertanian, sektor industri ramah lingkungan dan pengembangan infrastruktur untuk peningkatan aksesibilitas. Sektor pertanian merupakan sektor.

Letak geografis Kabupaten Sukoharjo yang berbatasan langsung dengan Kota Surakarta menjadikan pertumbuhan industrinya pesat. Hal ini menyebabkan juga pertumbuhan penduduk yang relative cepat. Berdasarkan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo Semester I Tahun 2018, jumlah penduduk tercatat sebanyak 891.923 jiwa yang terdiri dari 447.912 laki-laki dan 444.011 perempuan. Penyebaran penduduk paling tinggi prosentasenya adalah di Kecamatan Grogol yaitu sebesar 13,45% kemudian presentase paling kecil yaitu Kecamatan Bulu sebesar 4,36%. Sedangkan kepadatan penduduk di Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2017 sebesar 1.883 jiwa setiap km², Kecamatan paling padat penduduk adalah Kartasura sebesar 6.696 jiwa per km² dan Kecamatan paling jarang penduduk adalah Bulu dengan kepadatan 632 jiwa per km². Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2011 sebesar 0,98 dan terus mengalami penurunan hingga pada tahun 2017 mencapai angka 0,80.



Adapun rasio ketergantungan penduduk Kabupaten Sukoharjo yang merupakan perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun dikalikan 100 yaitu sebesar 42,73. Angka ini menunjukkan dari 100 penduduk usia produktif mempunyai tanggungan sekitar 42 penduduk non produktif.

Segi kesehatan untuk penemuan kasus kesakitan yang baru pada tahun 2017 sebanyak 473 kasus dari 2708 perkiraan jumlah kasus atau mencapai 17,46 %. Pada tahun 2017 terdeteksi kasus DBD sebanyak 115 kasus sehingga angka kesakitan 12,9 / 100.000 penduduk dengan angka kematian sebanyak 1,74 % (2 kasus). Angka Usia Harapan Hidup di Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2016 mencapai 77,5 tahun.

Dari segi pendidikan, 99 % penduduk di Kabupaten Sukoharjo sudah melek huruf. Dari tingkat pendidikan terdapat warga yang lulus SD sebanyak 24,68%, lulus SLPT 17.10%, lulus SLTA 24.70% dan lulus pendidikan di atas SLTA sebanyak 7.66%. Pada tahun 2015 Angka Partisipasi Sekolah untuk usia 7-12 tahun sebesar 100%, usia 13-15 tahun sebesar 97,59%, usia 16-18 tahun sebesar 82.5%. Dengan rata-rata lama sekolah sebesar 8,50 tahun. Untuk Indeks Pembangunan Manusia pada tahun 2016 sebesar 75.06 dimana hal ini mengalami peningkatan disbanding tahun 2015 yang sebesar 74.53.

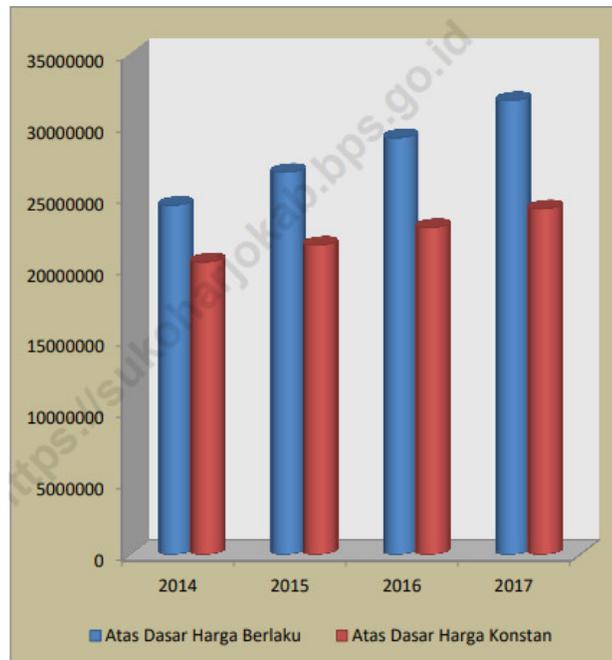
Dalam bidang ketenagakerjaan, pada tahun 2015 Kabupaten Sukoharjo mempunyai 668.761 penduduk usia kerja (penduduk usia 15 tahun ke atas) dan 449.188 (67,17%) merupakan angkatan kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada tahun 2015 tercatat sebesar 67.17%, hal ini berarti bahwa dari 100 orang penduduk usia kerja sekitar 67 orang termasuk angkatan kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5.79%. Sektor pekerjaan penduduk Sukoharjo sebagian besar bekerja di sector industri pengolahan sebesar 31.12%, perdagangan 24.16% dan jasa sebesar 19.49%.

Pertumbuhan investasi di Kabupaten Sukoharjo menyebabkan bidang industri menjadi penyokong utama pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Sukoharjo, selain itu juga didukung oleh perdagangan dan jasa. Perkembangan perekonomian ini memberikan efek terhadap pertumbuhan penduduk yang disebabkan oleh migrasi penduduk dari luar Kabupaten Sukoharjo.



Hal tersebut memberikan dampak positif terhadap penyerapan tenaga kerja yang mencapai 39,13 % di bidang industri, 24,16 % bidang perdagangan, 19,49 % bidang jasa dan sisanya adalah bidang pertanian dan peternakan.

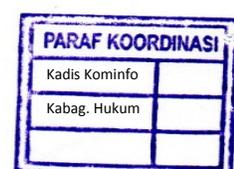
Pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Sukoharjo dari tahun ke tahun adalah sebagaimana dalam gambar berikut:

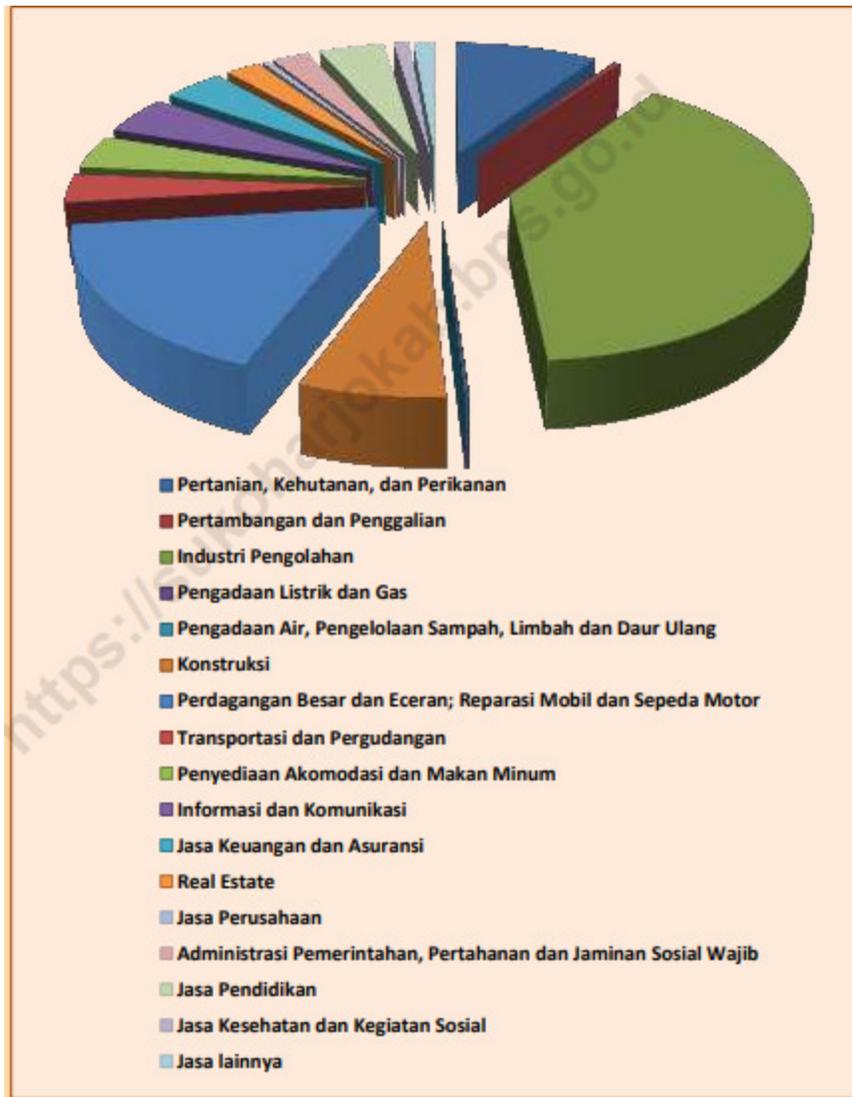


Gambar 1.1

Pertumbuhan perekonomian Kabupaten Sukoharjo

Dari gambar di atas dapat dilihat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Sukoharjo mempunyai pergerakan yang positif yaitu mengalami peningkatan dimana PDRB Atas Dasar Harga Berlaku tahun 2014, nilai PDRB Kabupaten Sukoharjo 24.407.489 juta rupiah dan di tahun 2017 mencapai 31.715.414 juta rupiah. Peningkatan PDRB tersebut disokong oleh sektor industri yang mencapai 39,13% hal ini disebabkan karena banyaknya pabrik-pabrik di Kabupaten Sukoharjo. Penyerapan tenaga kerja berdasarkan bidang pekerjaan digambarkan dalam gambar di bawah ini:



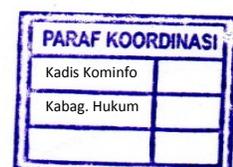


Gambar 1.2

Penyerapan tenaga kerja berdasar bidang pekerjaan

Dengan adanya pertambahan penduduk ini menimbulkan berbagai permasalahan seperti penurunan kualitas layanan publik, berkurangnya lahan pertanian karena berubah fungsi menjadi lahan industri atau perumahan, berkurangnya lahan pemukiman, kemacetan di jalan raya, sulitnya mendapat lahan parkir, permasalahan sampah, timbulnya pencemaran lingkungan, meningkatnya kriminalitas dan masalah-masalah sosial lainnya. Dan dengan bertambah lajunya tingkat pertumbuhan industri dan penduduk di Kabupaten Sukoharjo menyebabkan meningkatnya dan bertambahnya masalah-masalah tersebut. Untuk menyelesaikan serta mencegah timbulnya permasalahan diperlukan solusi cerdas.

Saat ini di Indonesia tengah berkembang konsep kota cerdas, dimana *Smart city* adalah sebuah konsep kota cerdas yang membantu masyarakat yang berada di dalamnya dengan mengelola sumber daya



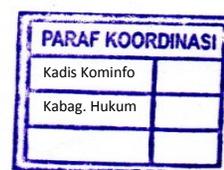
yang ada dengan efisien dan memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat/lembaga dalam melakukan kegiatannya ataupun mengantisipasi kejadian yang tak terduga sebelumnya. Menurut Caragliu,A., dkk dalam Schaffers (2010:3) *Smart City* didefinisikan sebagai kota yang mampu menggunakan SDM, modal sosial, dan infrastruktur telekomunikasi modern untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan kualitas kehidupan yang tinggi, dengan manajemen sumber daya yang bijaksana melalui pemerintahan berbasis partisipasi masyarakat.

Sedangkan menurut Ahmad Nurman dalam Manajemen Perkotaan, Kota cerdas atau *smart city*, pada umumnya didasarkan pada 3 hal, pertama faktor manusia, kota dengan manusia-manusia yang kreatif dalam pekerjaan, jejaring pengetahuan, lingkungan yang bebas dari kriminal. Kedua faktor teknologi, kota yang berbasis teknologi komunikasi dan informasi. Terakhir faktor kelembagaan, masyarakat kota (pemerintah, kalangan bisnis dan penduduk) yang memahami teknologi informasi dan membuat keputusan berdasarkan pada teknologi informasi.

Menurut Cohen (2011) kota cerdas diidentifikasi pada enam dimensi utama yaitu *smart government, smart economy, smart society, smart mobility, smart environment* dan *wuality of life*. Pengertian dari mobilitas cerdas sebagai salah satu dimensinya merupakan mobilitas yang cerdas pada sebuah kota cerdas yang menekankan pada pergerakan yang mudah. Hal ini menuntut kemampuan inovatif dan berkelanjutan. Dari enam dimensi tersebut dalam implementasinya setiap kota dapat memfokuskan pada salah satu dimensi tergantung karakteristik kota dan urgensi permasalahannya.

Proses pembangunan *smart city* merupakan usaha berkelanjutan dan memerlukan waktu yang tidak seketika serta memerlukan keterlibatan banyak pihak baik dari warga, pemerintah, pihak swasta dan berbagai *stakeholder* lainnya. Berdasarkan gambaran di atas maka Pemerintah Kabupaten Sukoharjo memerlukan wadah sebagai tempat untuk menampung berbagai inovasi demi mewujudkan masyarakat Sukoharjo yang sejahtera, maju, bermartabat dan professional dengan Rencana Induk *Smart City* Kabupaten Sukoharjo.

Rencana Induk ini sebagai landasan dan panduan pembangunan konsep kota cerdas Kabupaten Sukoharjo. Rencana Induk berperan



dalam membantu Pemerintah menetapkan kebijakan, regulasi, arah serta prioritas pembangunan kota.

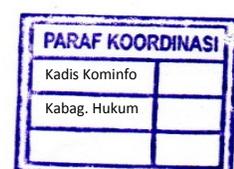
1.2 Tujuan

1. Penyusunan Rencana Induk Sukoharjo *Smart City* Tahun 2018-2022 bertujuan untuk memberikan arahan percepatan strategi, kebijakan dan program pembangunan Kabupaten Sukoharjo yang telah tertuang dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2016-2021, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) tahun 2005-2025 dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sukoharjo Tahun 201-203 dengan pendekatan perencanaan 6 (enam) pilar *smart city* yaitu *smart governance, smart environment, smart living, smart branding, smart society dan smart economy*.
2. Proses penyusunan Rencana Induk *Smart City* dengan melakukan analisis-analisis seperti analisis masa depan, analisis kesiapan daerah (struktur, infrastruktur, dan suprastruktur. Kedepannya, diharapkan dengan adanya Rencana Induk *Smart City* Kabupaten Sukoharjo tahun 2018-2022 ini, permasalahan-permasalahan yang ada di Kabupaten Sukoharjo dapat diselesaikan sesuai dengan target-target yang telah tertuang dalam dokumen perencanaan.

1.3 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum adalah sebagai berikut:

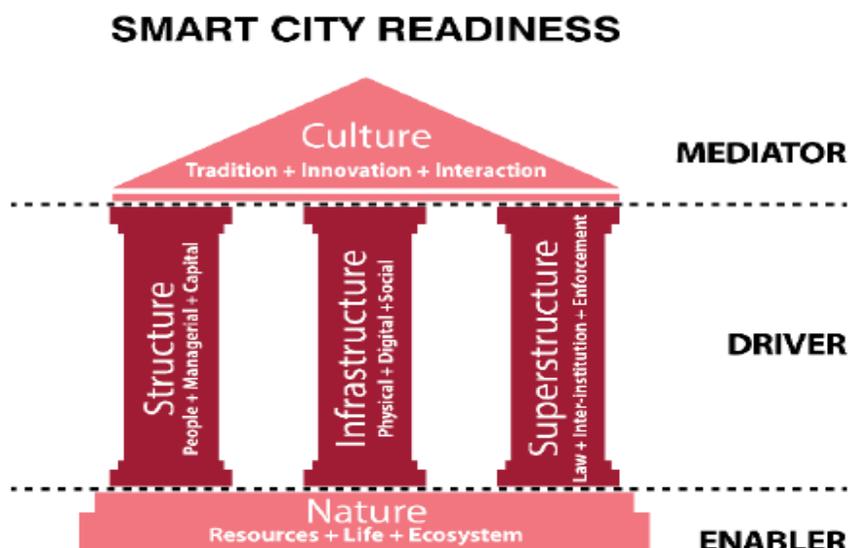
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;



8. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika;
10. *Memorandum of Understanding (MoU)* antara Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan Bupati Sukoharjo Tahun 2018 tentang Implementasi Gerakan Menuju 100 *Smart City* di Indonesia;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016- 2021.

1.4 Kerangka Pikir *Smart City*

Dalam membangun *smart city* Kabupaten Sukoharjo telah mempunyai Kesiapan Daerah Pintar atau *Smart City Readiness*. Terdapat beberapa elemen utama kesiapan daerah pintar yaitu potensi alam (*nature*), struktur daerah (*structure*), infrastruktur (*infrastructure*), suprastruktur (*suprastructure*) dan budaya (*culture*). Untuk menyusun Rencana Induk ini, kajian *Smart City Readiness* ditekankan kepada tiga elemen saja yaitu struktur, infrastruktur dan suprastruktur. Ilustrasi elemen kesiapan daerah pintar tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.3.



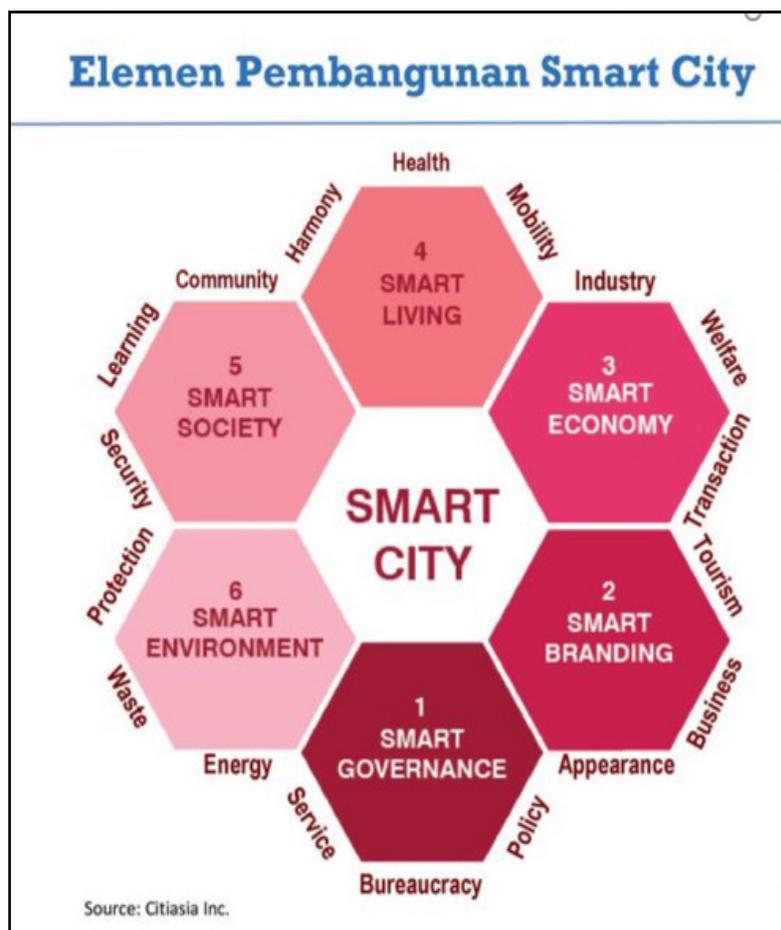
Gambar 1.3

Ilustrasi elemen kesiapan daerah pintar

PARAF KOORDINASI	
Kadis Kominfo	
Kabag. Hukum	

- a. Struktur; pembangunan sumber daya manusia (SDM) pelaksana (people) dan penerima manfaat *Smart City*, penyiapan sumber daya anggaran, dan sumber daya tata kelola dan tata pamong;
- b. Infrastruktur; pembangunan infrastruktur pendukung *Smart City* yang meliputi infrastruktur fisik, infrastruktur digital atau TIK, dan infrastruktur social untuk kepentingan umum;
- c. Suprastruktur; penyiapan kebijakan atau peraturan daerah, kelembagaan, dan tata-laksana pelaksanaan pembangunan *Smart City*.

Kerangka pikir berikutnya dari sebuah *Smart City* adalah dimensi-dimensi yang terdapat di dalam *Smart City* itu sendiri. Ilustrasi dimensi-dimensi dalam *Smart City* dapat dilihat pada Gambar 1.4.



Gambar 1.4

Dimensi *Smart City*

PARAF KOORDINASI	
Kadis Kominfo	
Kabag. Hukum	

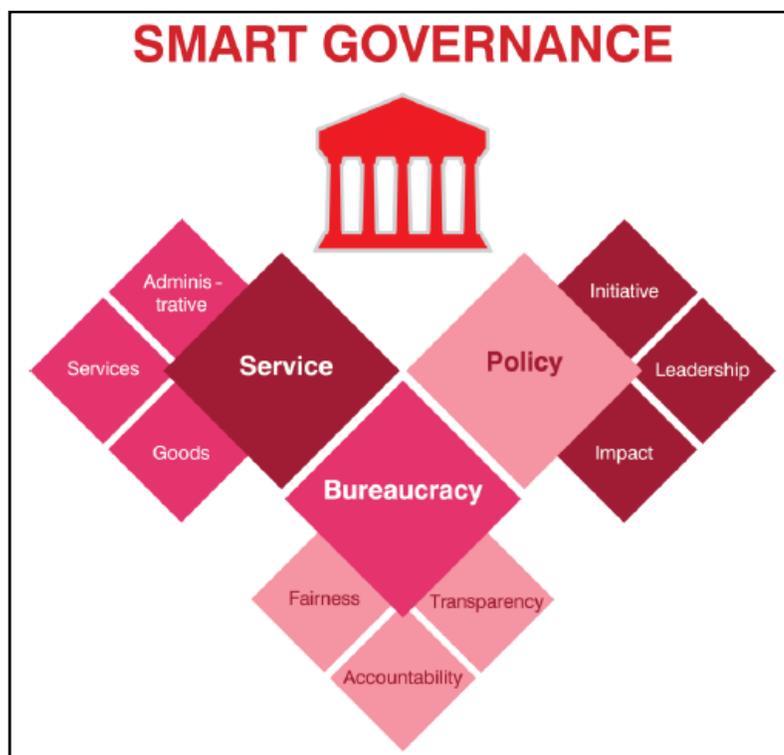
Adapun penjabaran dari masing-masing dimensi *Smart City* adalah sebagai berikut:

1. Smart Governance

Smart Governance dapat diartikan sebagai tata kelola kota yang pintar, dimana komponen tata kelola ini umumnya menyoroti tata kelola dari pemerintah daerah sebagai institusi yang mengendalikan sendi-sendi kehidupan kota. Sehingga *Smart Governance* di dalam dimensi *Smart City* merupakan gambaran dari tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan secara pintar, yaitu tata kelola pemerintahan yang mampu mengubah pola-pola tradisional dalam birokrasi sehingga menghasilkan *business process* yang lebih cepat, efektif, efisien, komunikatif dan selalu melakukan perbaikan.

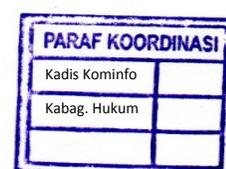
Sasaran dari *Smart Governance* adalah mewujudkan tata kelola dan tata pamong pemerintahan daerah yang efektif, efisien, komunikatif, dan terus melakukan peningkatan kinerja birokrasi melalui inovasi dan adopsi teknologi yang terpadu.

Smart Governance harus dapat diimplementasikan ke dalam tiga unsur dalam tata kelola, yaitu: Pelayanan (*Service*), Birokrasi (*Bureaucracy*) dan Kebijakan (*Policy*).



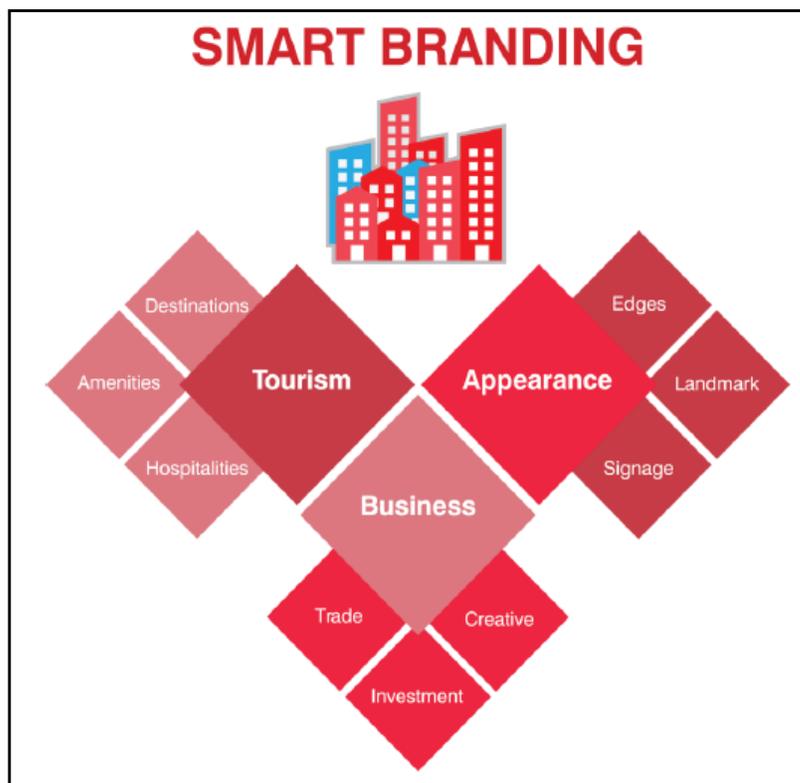
Gambar 1.5

Dimensi *Smart Governance*



2. Smart Branding

Smart branding yaitu *branding* daerah yang pintar. Yang dimaksud dengan *Smart Branding* adalah inovasi dalam memasarkan daerahnya sehingga mampu meningkatkan daya saing daerah dengan mengembangkan tiga elemen, yaitu: Pariwisata (*Tourism*), Bisnis (*Business*) dan Wajah Kota (*Appearance*).



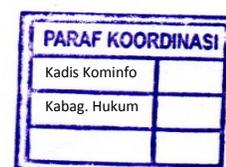
Gambar 1.6

Dimensi *Smart Branding*

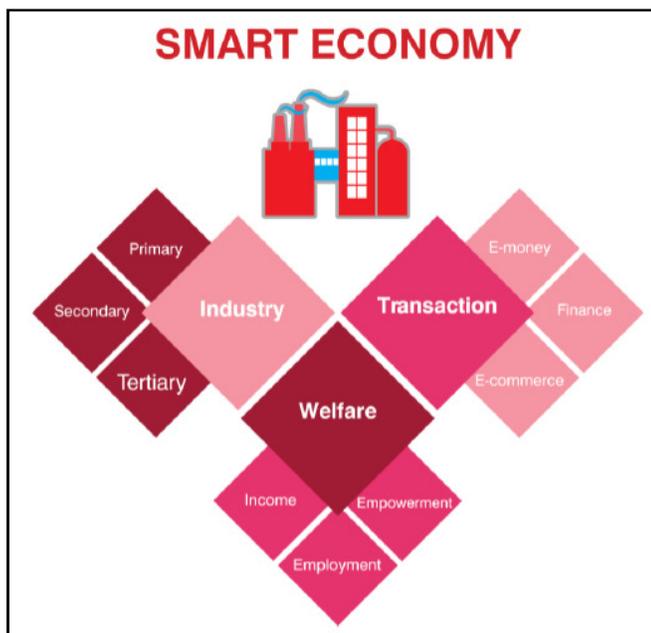
3. Smart Economy

Smart economy atau tata kelola perekonomian yang pintar. *Smart economy* dalam *Smart City* dimaksudkan untuk mewujudkan ekosistem perekonomian di daerah yang mampu memenuhi tantangan di era informasi yang disruptif dan menuntut tingkat adaptasi yang cepat seperti saat ini.

Sasaran dari dimensi *smart economy* di dalam *Smart City* adalah mewujudkan ekosistem yang mendukung aktifitas ekonomi masyarakat yang selaras dengan sektor ekonomi unggulan daerah yang adaptif terhadap perubahan yang terjadi di era informasi saat ini, serta meningkatkan *financial literacy* masyarakat melalui berbagai program diantaranya mewujudkan *less-cash society*.



Sasaran tersebut diwujudkan dengan mengembangkan tiga elemen dalam *smart economy*, yaitu: Ekosistem Industri (*Industry*), Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (*Welfare*) dan Ekosistem Transaksi Keuangan (*Transaction*).

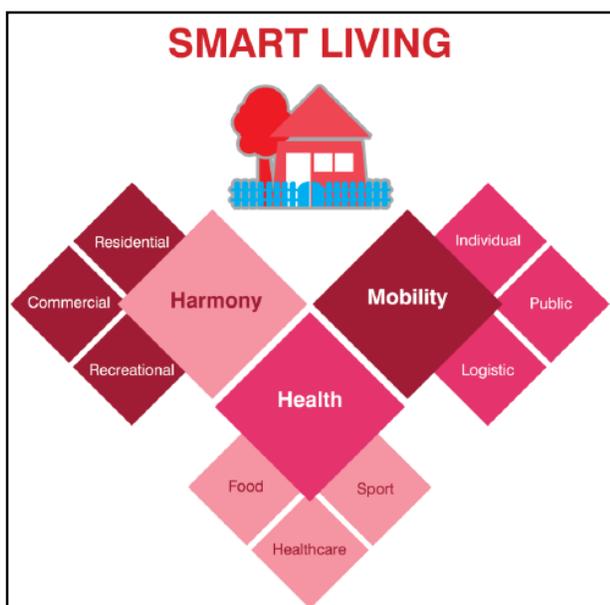


Gambar 1.7

Dimensi *Smart Economy*

4. Smart Living

Smart living (kualitas hidup). Berbudaya, berarti bahwa manusia memiliki kualitas hidup yang terukur (budaya). Kualitas hidup tersebut bersifat dinamis, dalam artian selalu berusaha memperbaiki dirinya sendiri.



Gambar 1.8

Dimensi *Smart Living*

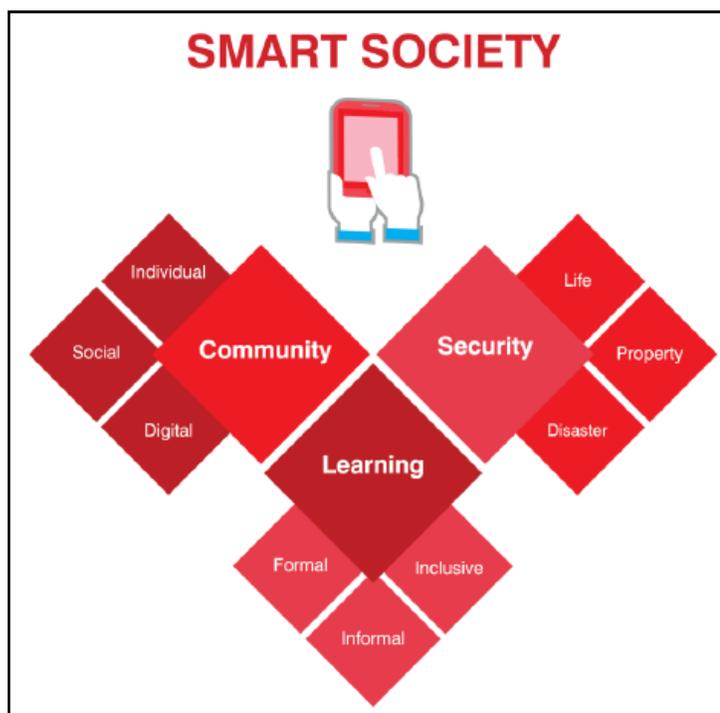


5. Smart Society

Smart society merupakan dimensi yang banyak membahas tentang manusia sebagai unsur utama sebuah kota. Di dalam sebuah *Smart City*, interaksi antar manusia telah bergerak menuju ekosistem sosio-teknis dimana dimensi fisik dan virtual dari kehidupan warga kota semakin terjalin secara intensif. Interaksi antar-warga terjalin dengan semakin kuat dan tanpa sekat dengan mediasi teknologi.

Sasaran dari *smart society* dalam *Smart City* adalah mewujudkan ekosistem sosio-teknis masyarakat yang humanis dan dinamis, baik fisik maupun virtual untuk terciptanya masyarakat yang produktif, komunikatif, dan interaktif dengan *digital literacy* yang tinggi.

Sasaran dari *smart society* tersebut diwujudkan dengan pengembangan tiga elemen di dalam *smart society*, yaitu: Komunitas Warga (*Community*), Ekosistem Pembelajaran (*Learning*) dan Sistem Keamanan (*Security*).



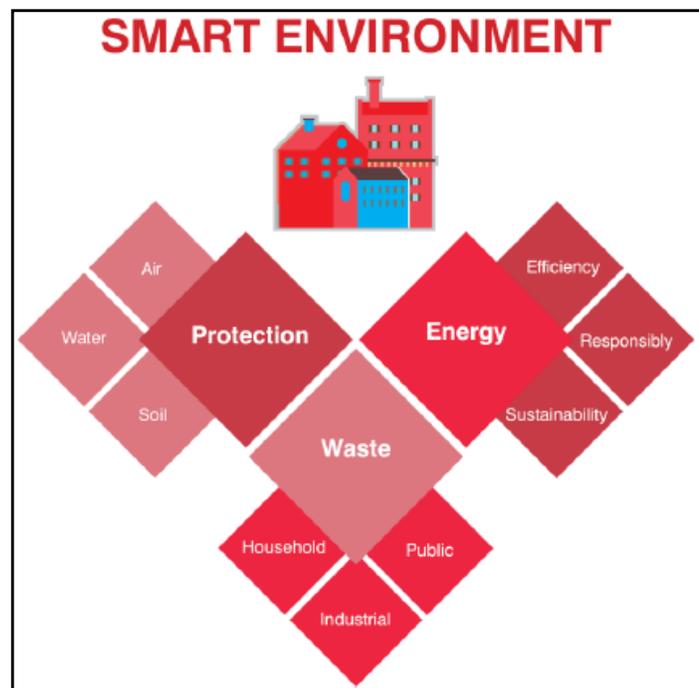
Gambar 1.9

Dimensi *Smart Society*

PARAF KOORDINASI	
Kadis Kominfo	
Kabag. Hukum	

6. Smart Environment

Ide dasar dari *smart environment* di dalam *Smart City* adalah untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, dimana hal tersebut tidak boleh hilang dengan lahirnya ide tentang *Smart City* yang menjadikan elemen teknologi sebagai elemen pendorongnya antara lain sebagai berikut: mengembangkan Program Proteksi Lingkungan (*Protection*), mengembangkan Tata Kelola Sampah dan Limbah (*Waste*) dan mengembangkan Tata Kelola Energi Yang Bertanggungjawab (*Energy*)



Gambar 1.10

Dimensi *Smart Environment*

PARAF KOORDINASI	
Kadis Kominfo	
Kabag. Hukum	

BAB II

VISI SMART CITY KABUPATEN SUKOHARJO

2.1 Visi Kabupaten Sukoharjo

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo 2016-2021 telah menetapkan misi Pembangunan Kabupaten Sukoharjo adalah ***TERUS MEMBANGUN SUKOHARJO YANG LEBIH SEJAHTERA, MAJU, DAN BERMARTABAT DI DUKUNG PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL.***

Visi Pembangunan Kabupaten Sukoharjo ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Kabupaten Sukoharjo. Visi Pembangunan Kabupaten Sukoharjo tersebut harus dapat diukur keberhasilannya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan, makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

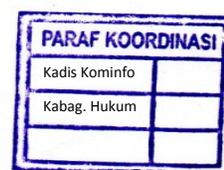
SEJAHTERA: Mengandung makna dalam lima tahun ke depan akan terjadi semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat, yang diindikasikan dengan meningkatnya pendapatan perkapita penduduk yang berdampak pula pada menurunnya angka kemiskinan, serta peningkatan keterjangkauan pelayanan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.

MAJU : Mengandung Makna Kondisi pembangunan daerah yang dilandasi keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan ekonomi, sosial dan lingkungan fisik yang lebih baik, didukung sumberdaya manusia yang unggul, profesional, berperadaban tinggi, berdaya saing, berakhlak mulia serta berwawasan ke depan;

BERMARTABAT : Mengandung makna kondisi kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara yang bertumpu pada nilai-nilai budi pekerti dan budaya yang luhur, mengedepankan etika, moral, maupun norma agama masyarakat;

PROFESIONAL : Mengandung Makna bahwa Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik (Partisipatif, Akuntable, Transparan dan Efisien) dan bersih (bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme).

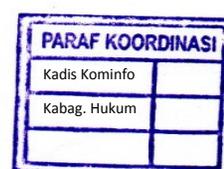
Adapun Misinya adalah Untuk mewujudkan Visi Kabupaten Sukoharjo 2016-2021 tersebut, maka dijabarkan dalam 5 (lima) misi yang menjadi pedoman bagi pembangunan Kabupaten Sukoharjo:



1. Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Transparan.
 - Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas.
 - Meningkatkan Partisipasi Publik dalam Proses Pengambilan Kebijakan Publik.
2. Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat.
 - Meningkatkan kualitas layanan publik;
 - Mengurangi ketimpangan antar kelompok ekonomi masyarakat;
 - Mewujudkan pemenuhan pelayanan dasar publik.
3. Memperkuat Kemandirian Ekonomi Daerah dengan menggerakkan Sektor Unggulan Daerah
 - Mewujudkan Ketahanan Pangan
 - Mewujudkan Pelestarian Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana;
 - Mewujudkan Penguatan Iklim Investasi;
 - Mewujudkan Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi.
4. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama dan Bermasyarakat.
 - Mewujudkan fasilitasi Kerukunan Kehidupan Beragama
 - Mewujudkan pelestarian seni dan budaya daerah sebagai identitas lokal.
5. Mewujudkan Kondisi Masyarakat yang Tenang, Aman dan Dinamis
 - Mewujudkan lingkungan yang kondusif bagi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.

Berdasarkan visi di atas, maka Visi *Smart City* Kabupaten Sukoharjo adalah: **"TERWUJUDNYA SMART CITY DI KABUPATEN SUKOHARJO UNTUK SUKOHARJO YANG LEBIH SEJAHTERA, MAJU, DAN BERMARTABAT"**

Visi tersebut dibentuk melalui 3 (tiga) pokok visi yaitu : aspek lingkungan, ekonomi dan sosial melalui 6 pilar kota cerdas (*smart city*) diharapkan impian masyarakat terhadap Kabupaten Sukoharjo ini dapat terwujud.



Dalam rangka mewujudkan Visi *Smart City* Kabupaten Sukoharjo yang telah ditetapkan di atas, maka selanjutnya ditentukan Misi *Smart City* Kabupaten Sukoharjo sebagai berikut:

1. Memperkuat tata kelola dan tata pamong pemerintahan Kabupaten Sukoharjo yang bersih efektif dan transparan.
2. Meningkatkan daya saing daerah dengan penataan wajah kota, penataan potensi desa dan pemasaran pariwisata daerah.
3. Memperkuat kemandirian ekonomi daerah dengan menggerakkan sektor unggulan daerah serta meningkatkan *financial literacy* masyarakat.
4. Mewujudkan lingkungan tempat tinggal yang nyaman dan pintar untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
5. Mewujudkan ekosistem masyarakat yang produktif, komunikatif, dan interaktif dengan *digital literacy* yang tinggi.
6. Mewujudkan tata kelola lingkungan yang baik, bertanggung jawab dan berkesinambungan.

2.2 Sasaran *Smart City* Kabupaten Sukoharjo

Pembangunan *smart city* Kabupaten Sukoharjo meliputi enam elemen yaitu:

1. *Smart Governance*

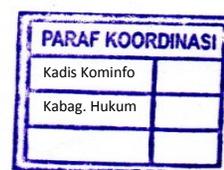
Smart Governance bertujuan untuk mewujudkan tata kelola dan tata pamong pemerintahan daerah yang efektif, efisien, komunikatif, dan terus melakukan peningkatan kinerja birokrasi melalui inovasi dan adopsi teknologi yang terpadu.

Adapun sasaran dari *smart governance* adalah:

- a. Meningkatkan kualitas layanan publik (*Public Service*)
 1. Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan melalui penguatan pelayanan yang dapat dijangkau dan diakses masyarakat dengan lebih mudah, murah dan darimanapun berbasis *mobile*.
 2. Peningkatan kualitas layanan publik melalui pengembangan e-perizinan
 3. Peningkatan kualitas layanan publik bagi pemerintah desa dengan pembangunan e-desa.
 4. Peningkatan layanan pendidikan melalui e-ppdb, penerimaan peserta didik baru *online* untuk SMP



5. Peningkatan layanan ketenagakerjaan melalui aplikasi GOJOB, sistem informasi lowongan kerja
 6. Peningkatan layanan pajak daerah melalui e-pbb&bhptb
 7. Peningkatan layanan informasi dan komunikasi publik melalui aplikasi LaporBup dan akses informasi melalui web, media sosial serta media massa
 8. Pengembangan Sistem Informasi Potensi Produksi Pangan Daerah
- b. Meningkatkan efisiensi birokrasi (*Bureaucracy*)
1. Penguatan aplikasi untuk *open government (e-planning)*
 2. Pembuatan kebijakan tentang TNDE dan Tanda Tangan Digital sehingga layanan perizinan dan administrasi kependudukan bisa lebih mudah dan cepat.
 3. Pembuatan kebijakan untuk mewajibkan pemanfaatan data kependudukan.
 4. Pengintegrasian sistem rekomendasi perizinan dan layanan perizinan *online*
 5. Tersedianya regulasi tata kelola pemerintahan berbasis *smart city*
 6. Pengembangan kantor pemerintahan terpadu berbasis *smart buliding*
 7. Pengembangan Sukoharjo *Command Centre*
 8. Peningkatan Pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informasi
 9. Peningkatan Pengelolaan keuangan desa berbasis teknologi informasi
 10. Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian yang terintegrasi dengan e-kinerja
- c. Meningkatkan efisiensi kebijakan publik (*Public Policy*)
1. Penguatan aplikasi untuk *open government*
 2. Adanya mekanisme partisipasi publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi



2. **Smart Branding**

Smart branding memiliki sasaran untuk peningkatan daya saing daerah dengan penataan wajah kota dan pemasaran potensi daerah baik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional.

Adapun sasaran dari *smart branding* adalah:

- a. Membangun dan memasarkan ekosistem pariwisata (*Tourism Branding*)
 1. Membangun dan mengembangkan *village tourism*, wisata berbasis potensi desa
 2. Mengembangkan wisata berbasis religi dan alam
 3. Menyebarkan informasi wisata di media massa, web dan media sosial
 4. Mengembangkan sistem informasi pariwisata berbasis GIS dan mobile. Meningkatkan kualitas layanan wisata dengan peningkatan infrastruktur pendukung destinasi wisata
 5. Meningkatkan infrastruktur pendukung destinasi wisata yang baru

- b. Membangun dan memasarkan ekosistem bisnis daerah (*Business Branding*)
 1. Mengembangkan industri kreatif, kuliner asli, produk UMKM dan produk khas desa wisata
 2. Mengembangkan pemasaran industri kreatif, kuliner asli, produk UMKM dan produk khas desa wisata
 3. Mengembangkan pusat informasi bisnis daerah berbasis teknologi informasi
 4. Mengembangkan *e-commerce* untuk industri kreatif, kuliner asli, produk UMKM dan produk khas desa wisata

- c. Membangun dan memasarkan ekosistem wajah kota (*City Appearance Branding*)
 1. Menata wajah kota sesuai dengan RTRW
 2. Memperbaiki kawasan pintu masuk Kabupaten Sukoharjo untuk memperjelas keberadaan Kabupaten Sukoharjo
 3. Mengembangkan ikon Kabupaten Sukoharjo



3. **Smart Economy**

Smart economy memiliki sasaran untuk mewujudkan ekosistem yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat yang selaras dengan sektor ekonomi unggulan daerah yang adaptif terhadap perubahan di era informasi saat ini, serta meningkatkan *financial literacy* masyarakat melalui berbagai program diantaranya mewujudkan *less-cash society*.

Adapun sasaran dari *smart economy* adalah:

- a. Membangun ekosistem ekonomi yang berdaya saing (*Industry*)
 1. Meningkatkan kualitas layanan sistem perizinan
 2. Mengembangkan *e-commerce* Kabupaten Sukoharjo
 3. Meningkatkan promosi dengan memanfaatkan teknologi informasi
 4. Mengembangkan *e-catalog* daerah
 5. Menyusun kebijakan yang mendukung *e-catalog* daerah

- b. Mewujudkan kesejahteraan rakyat (*Welfare*)
 1. Mengembangkan koperasi dan UMKM
 2. Meningkatkan kapasitas koperasi dan UMKM

- c. Membangun ekosistem transaksi keuangan (*Transaction*)
 1. Mengembangkan kebijakan yang mendukung transaksi non tunai atau *cashless transaction*
 2. Meningkatkan transaksi non tunai atau *cashless transaction* melalui *e-commerce*

4. **Smart Living**

Untuk mewujudkan lingkungan tempat tinggal yang layak ada tiga elemen yang digunakan sebagai tolok ukur diantaranya kehidupan yang harmoni, kehidupan yang sehat dan didukung oleh alat transportasi untuk mendukung mobilitas orang dan barang.

Adapun sasaran dari *smart living* adalah:

- a. Harmonisasi tata ruang wilayah (*Harmony*)
 1. Mengembangkan layanan informasi tata ruang berbasis GIS
 2. Mengembangkan sistem informasi RTH dan RTLH
 3. Mengembangkan aplikasi EWS atau *Early Warning System* kebencanaan Kabupaten Sukoharjo



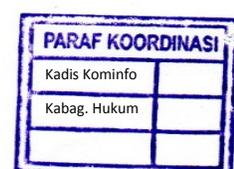
- b. Mewujudkan prasarana kesehatan (*Health*)
 - 1. Mengembangkan *e-health*, sistem kesehatan terpadu
 - 2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana kesehatan yang terpadu
- c. Menjamin ketersediaan sarana transportasi (*Mobility*)
 - 1. Mengembangkan *e-traffic* terpadu
 - 2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana transportasi
 - 3. Mengembangkan kebijakan alat transportasi terpadu

5. **Smart Society**

Smart city menitikberatkan manusia sebagai unsur utama dalam suatu daerah dengan adanya ekosistem sosio teknis yang menunjukkan pergerakan antara dimenfisik dan virtual yang terjalin lebih intens. Hal tersebut menyebabkan terjadinya interaksi social yang tanpa batas dan tanpa sekat antar manusia dengan pemanfaatan teknologi informasi.

Adapun sasaran dari *smart society* adalah:

- a. Mewujudkan Interaksi Masyarakat Yang Efisien (*Community*)
 - 1. Mengembangkan kabupaten inklusi, kabupaten yang nyaman bagi semua orang
 - 2. Mengembangkan pusat data difabel
 - 3. Mengembangkan layanan interaksi warga berbasis teknologi informasi
 - 4. Mengembangkan nilai budaya, agama dan olahraga
 - 5. Meningkatkan kualitas hidup dan Perlindungan perempuan
 - 6. Peningkatan kesehatan ibu, bayi dan anak
 - 7. Pengembangan masyarakat peduli Keluarga Berencana
 - 8. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan, perempuan dan anak
- b. Membangun Ekosistem Belajar Yang Efisien (*Learning*)
 - 1. Mengembangkan gemar membaca berbasis teknologi informasi
 - 2. Meningkatkan pengelolaan arsip berbasis teknologi informasi
 - 3. Meningkatkan kapasitas produksi literasi digital oleh warga



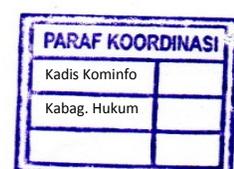
- c. Mewujudkan Sistem Keamanan Masyarakat (*Security*)
 - 1. Membina Kader Siaga Trantib
 - 2. Mewujudkan sistem keamanan masyarakat
 - 3. Mengembangkan aplikasi *one panic button*
 - 4. Mengembangkan aplikasi EWS atau *early warning system* kebencanaan Kabupaten Sukoharjo

6. **Smart Environment**

Smart environment memiliki sasaran untuk mewujudkan tata kelola lingkungan hidup Kabupaten Sukoharjo yang baik, bertanggung-jawab, dan berkelanjutan.

Adapun sasaran dari *smart environment* adalah:

- a. Mengembangkan Program Proteksi Lingkungan (*Protection*)
 - 1. Mengembangkan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup
 - 2. Meningkatkan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
 - 3. Mengembangkan sistem informasi RTH dan RTLH
- b. Mengembangkan Tata Kelola Sampah dan Limbah (*Waste*)
 - 1. Mengembangkan kinerja tata kelola persampahan
 - 2. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam tata kelola sampah
 - 3. Meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha di Kabupaten Sukoharjo dalam tata kelola limbah
 - 4. Mengembangkan pemantauan limbah berbasis aplikasi
- c. Mengembangkan Tata Kelola Energi Yang Bertanggung jawab (*Energy*)
 - 1. Mengembangkan program pengendalian terhadap perubahan iklim
 - 2. Mengembangkan kebijakan mengenai *green building*
 - 3. Mengembangkan penciptaan dan pemanfaatan energi terbarukan



BAB III

STRATEGI PEMBANGUNAN *SMART CITY*

3.1 Smart Governance

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, komunikatif serta untuk meningkatkan kinerja birokrasi sebagai sasaran *smart governance*, maka dibutuhkan strategi.

Smart governance membutuhkan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat untuk mewujudkan tata kelola yang bersih, efektif dan efisien. Strategi pengembangan *smart governance* meliputi:

- a) Pengembangan aplikasi perizinan *online* dan layanan adiminstrasi kependudukan berbasis *android / ios*
- b) Pembangunan aplikasi Sistem Informasi Desa
- c) Pengembangan aplikasi e-ppdb
- d) Pengembangan aplikasi GOJOB
- e) Pengembangan aplikasi e-pbb&phtb
- f) Pengembangan aplikasi LaporBup
- g) Pembangunan Data Center di Gedung Terpadu (*Smart Building*) dengan standar ISO
- h) Pembuatan Peraturan Daerah tentang *Master Plan Smarcity*
- i) Implementasi Peraturan Menteri Kominfo Nomor 4 Tahun 2016 tentang SMPI (Sistem Manajemen Pengelolaan Informasi)
- j) Membuat kebijakan untuk mewajibkan pemanfaatan aplikasi layanan administrasi kependudukan
- k) Melakukan integrasi sistem rekomendasi perizinan dan layanan perizinan online
- l) Pengembangan aplikasi keuangan daerah terintegrasi
- m) Pengembangan aplikasi keuangan desa terintegrasi
- n) Pengembangan Sistem Informasi Potensi Produksi Pangan Daerah
- o) Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian yang terintegrasi dengan e-kinerja
- p) Melakukan perekrutan SDM di bidang TIK dengan memberikan standar gaji yang dimasukkan dalam SSH.
- q) Membuat kebijakan tentang TNDE dan Tanda Tangan Digital sehingga layanan perizinan dan adminsittrasi kependudukan bisa lebih mudah dan cepat.



3.2 Smart Branding

Sasaran *smart branding* yaitu peningkatan daya saing daerah dengan penataan wajah kota dan pemasaran potensi daerah baik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional diwujudkan dengan beberapa strategi.

Strategi dalam *smart branding* yang dapat menciptakan keberlanjutan ekosistem pariwisata maupun bisnis dan juga penampilan wajah Kabupaten Sukoharjo berlandaskan pada peningkatan sarana prasarana, infrastruktur, SDM, maupun nilai jualnya antara lain:

- a) Pengembangan *village tourism*, wisata berbasis potensi desa
- b) Pengembangan wisata berbasis religi dan alam
- c) Penyebarluasan informasi wisata di media massa, web dan media sosial
- d) Pengembangan sistem informasi pariwisata berbasis GIS dan *mobile*.
- e) Peningkatan kualitas layanan wisata
- f) Pengembangan industri kreatif, kuliner asli, produk UMKM dan produk khas desa wisata
- g) Pemasaran industri kreatif, kuliner asli, produk UMKM dan produk khas desa wisata
- h) Pengembangan aplikasi informasi bisnis daerah
- i) Pengembangan e-commerce untuk industri kreatif, kuliner asli, produk UMKM dan produk khas desa wisata
- j) Perbaikan kawasan pintu masuk Kabupaten Sukoharjo
- k) Pengembangan ikon Kabupaten Sukoharjo

3.3 Smart Economy

Sasaran *smart economy* adalah untuk mewujudkan ekosistem yang mendukung aktifitas ekonomi masyarakat yang selaras dengan sektor ekonomi unggulan daerah yang adaptif terhadap perubahan di era informasi saat ini, serta meningkatkan *financial literacy* masyarakat melalui berbagai program diantaranya mewujudkan *less-cash society*.

Strategi untuk mencapai sasaran *smart economy* ini menitik beratkan pada lingkungan industri yang sinergis, saling membutuhkan dan menguntungkan baik produksi, promosi, bahkan transaksi keuangan, dalam suasana yang kondusif, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



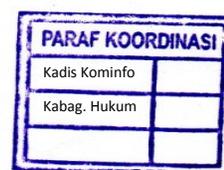
Secara lebih jelas, strategi dalam *smart economy* mencakup:

- a) Peningkatan Kualitas layanan perizinan (on-line sistem)
- b) Peningkatan promosi dengan sarana
- c) Membuat sistem *e-commerce* daerah
- d) Penambahan SDM Ahli Ekonomi
- e) Meningkatkan promosi branding sukoharjo
- f) Membuat branding sukoharjo (Sukoharjo kab jamu)
- g) Penggunaan teknologi dan inovasi
- h) Promosi kawasan industri
- i) Memperkuat potensi SDM
- j) Membuat Inovasi baru

3.4 Smart Living

Dalam rangka mewujudkan lingkungan tempat tinggal yang layak tinggal, nyaman, dan efisien sebagai sasaran dari *Smart living* dibutuhkan beberapa strategi. Beberapa strategi yang ditempuh dalam mewujudkan sasaran *Smart living* adalah:

- a) Pengembangan aplikasi SPGDT dan Simpus yang terintegrasi dengan data kependudukan
- b) Mengkoneksikan antar puskesmas
- c) Pembuatan kebijakan tentang SIMPUS dan SPGDT
- d) Menambah Sumber Daya Manusia di bidang Teknologi Informasi Kesehatan untuk pengembangan dan pengelolaan aplikasi kesehatan di Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah
- e) Pengembangan program “KOTAKU” (Kota Tanpa Kumuh) dan RLTH
- f) Pengembangan masterplan kawasan untuk penanganan pemukiman kumuh
- g) Sosialisasi pentingnya lingkungan yang nyaman
- h) Mengaplikasikan teknologi informasi untuk dapat mengantisipasi kejadian bencana yang akan datang
- i) Mengembangkan konsep *connected green buliding*
- j) Pengembangan aplikasi pendaftaran online
- k) Membangun ruangan yang memadai guna meningkatkan kepuasan masyarakat.
- l) Peningkatan prgram cctv online dapat memberikan kondisi *realtime* kepada masyarakat.

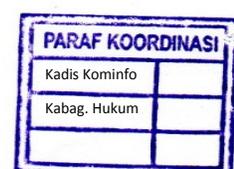


- m) Pengembangan Aplikasi SIMPLAN (Sistem Informasi Perlengkapan Jalan)
- n) Sosialisasi penggunaan aplikasi dan pantauan cctv online
- o) Sosialisasi keselamatan berlalulintas
- p) Membangun sistem informasi transportasi
- q) Peningkatan kualitas dan kuantitas alat transportasi
- r) Pengembangan konsep transportasi massal
- s) Penambahan trayek dan jalur
- t) Dibentuknya koperasi angkutan umum

3.5 Smart Society

Smart society merupakan wujud dari partisipasi cerdas masyarakat. Partisipasi masyarakat dapat terwujud melalui ekosistem sosio-teknis masyarakat yang humanis dan dinamis, baik fisik maupun virtual untuk terciptanya masyarakat yang produktif, komunikatif, dan interaktif dengan literasi digital yang tinggi. Strategi untuk mewujudkan *smart society* yaitu melalui:

- a) Menciptakan budaya masyarakat yang memiliki perilaku baik
- b) Pemahaman tentang kesadaran masyarakat melalui kelompok – kelompok masyarakat bahwa setiap orang memiliki perlakuan hak dan kewajiban yang sama dalam masyarakat
- c) Melaksanakan bimbingan teknis terhadap kelompok masyarakat
- d) Pendekatan secara kultur dan psikologis terhadap kelompok masyarakat.
- e) Adanya pelatihan – pelatihan dari pemerintah atau organisasi non pemerintah
- f) Masyarakat tidak perlu memerlukan perlakuan istimewa
- g) Pemberdayaan pemerintah, akademisi, dan non pemerintah untuk peduli terhadap kemajuan teknologi pada masyarakat
- h) Perlunya pendataan dan pembinaan kelompok masyarakat oleh perangkat daerah terkait
- i) Pemberdayaan kesenian, keagamaan, budaya, olahraga
- j) Peningkatan kesejahteraan terhadap masyarakat
- k) Meningkatkan kualitas hidup dan Perlindungan perempuan
- l) Peningkatan kesehatan ibu, bayi dan anak
- m) Pengembangan masyarakat peduli Keluarga Berencana



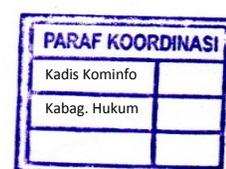
- n) Meningkatkan pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan, perempuan dan anak
- o) Sosialisasi wawasan tentang penggunaan teknologi dan UU ITE
- p) Keterlibatan pengamanan lingkungan dari tingkat paling bawah (lingkungan RT)
- q) Pemberdayaan kesenian, keagamaan, budaya, olahraga
- r) Sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman tentang inklusi
- s) Bimbingan pengetahuan tentang teknologi dan UU ITE oleh pemerintah
- t) Pendataan dan pembinaan kelompok – kelompok masyarakat oleh pemerintah

3.6 Smart Environment

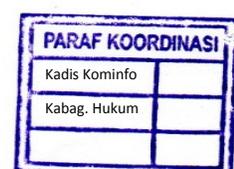
Dalam rangka mewujudkan tata kelola lingkungan yang baik, bertanggung-jawab, dan berkelanjutan sebagai sasaran dari *smart environment* dibutuhkan beberapa strategi.

Strategi yang ditempuh dalam usaha mewujudkan konsep *Smart environment* adalah:

- a) Pembuatan sistem informasi Ruang Terbuka Hijau dan RLTH
- b) Pembuatan sistem informasi area rawan bencana dan EWS
- c) Melibatkan masyarakat dalam menciptakan RTH
- d) Mereboisasi lahan kritis
- e) Menciptakan desa pelestari lingkungan
- f) Mendorong Program kampung iklim
- g) Meningkatkan pengawasan pelaksanaan Perda RTRW agar pemanfaatan lahan sesuai dengan peruntukannya
- h) Menciptakan dan mengelola Ruang Terbuka Hijau.
- i) Mendorong dunia usaha untuk mengelola limbahnya sendiri dengan memberikan insentif
- j) Menarik investor di bidang pengelolaan limbah
- k) Menambah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD)
- l) Meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda Pengendalian Lingkungan Hidup
- m) Membentuk TPS3R di tingkat kelurahan/desa
- n) Membentuk bank sampah di tingkat RT/RW
- o) Membentuk sekolah adiwiyata
- p) Mendorong tumbuhnya industry kreatif dari barang bekas



- q) Meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda Pengelolaan Sampah
- r) Mendorong masyarakat dalam penghematan penggunaan energi dengan pemanfaatan teknologi (contohnya : solarex)
- s) Mendorong masyarakat menciptakan dan menggunakan energi alternative
- t) Menarik investor di bidang pengelolaan energi alternative (contohnya : daerah Bulu bias memanfaatkan kincir angin)
- u) Melibatkan masyarakat, dunia usaha dan praktisi dalam pengelolaan lingkungan di Kabupaten Sukoharjo.



BAB IV

RENCANA AKSI SMART CITY

4.1 Pengembangan Kebijakan dan Kelembagaan *Smart City* Daerah

A. Kebijakan

1. Penetapan arah dan tujuan pengembangan *Smart City* Kabupaten Sukoharjo yang tertuang dalam dokumen perencanaan.
2. Adanya Rencana Induk pengembangan *Smart City* Kabupaten Sukoharjo yang meliputi *smart governance, smart branding, smart economy, smart living, smart society dan smart environment*
3. Terintegrasinya seluruh aplikasi dengan data kependudukan dan tanda tangan digital / sertifikat elektronik
4. Tersedianya data sektoral seluruh Perangkat Daerah sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah

B. Kelembagaan

1. Peningkatan kapasitas Dewan *Smart city* dalam:
 - a. memberikan arahan aspek strategis Teknologi Informasi dalam *Smart City* dan tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi;
 - b. memberikan persetujuan dan dukungan bagi usulan kebijakan, rencana kerja dan inisiatif strategis Teknologi Informasi dalam *Smart City*;
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan;
2. Peningkatan kapasitas Tim Teknis *Smart city*, meliputi:
 - a. melakukan Koordinasi antar Pemangku Kepentingan di Kabupaten Sukoharjo serta memberdayakan sumber daya manusia Kabupaten Sukoharjo;
 - b. melakukan Analisis Kebutuhan sistem informasi beserta solusi serta mendesain dan memadukan sistem informasi pendukung *Smart City* Kabupaten Sukoharjo;
 - c. mengembangkan sistem informasi sesuai kebutuhan serta mengintegrasikan sistem informasi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;



- d. melakukan perencanaan dan pemenuhan kebutuhan infrastruktur yang dibutuhkan dengan menggunakan anggaran di masing-masing perangkat daerah secara bersama-sama;
 - e. memberikan persetujuan dan pengendalian atas pengembangan program Teknologi Informasi dan Komunikasi di masing-masing perangkat daerah;
 - f. menyediakan layanan bantuan dan *transfer knowledge*;
 - g. melakukan pengkajian, evaluasi dan masukan dalam menetapkan langkah-langkah penyelesaian masalah strategis yang timbul dalam rangka pelaksanaan *Smart City*;
3. Peningkatan sinergi antar pihak pendukung *smart city* yaitu pemerintah, akademik, praktisi, bisnis, komunitas dan media dalam merumuskan kebijakan dan mengimplementasikan program pengembangan *smart city*.
 4. Pengembangan organisasi, regulasi dan tata kelola terkait standar dan tata cara, standar, atau pengaturan dalam pengembangan dan implementasi *smart city*, yang meliputi:
 - a. Perubahan Peraturan Bupati tentang *e-Government*
 - b. Perubahan Peraturan Bupati tentang *Smart City*
 - c. Penyusunan Peraturan Bupati terkait tata kelola TIK
 - d. Pengembangan regulasi terkait telekomunikasi publik
 - e. Penyusunan Tata Kelola Keamanan Informasi
 - f. Penyusunan SOP strategi *backup* sistem dan pemulihannya
 - g. Penyusunan SOP Keamanan Infrastruktur Fisik TIK
 - h. Penyusunan tata kelola pemanfaatan *datawarehouse* (pusat data)

4.2 Rencana Pembangunan Infrastruktur Pendukung *Smart City*

A. Rencana pengembangan infrastruktur fasilitas publik

Pengembangan infrastruktur fasilitas publik pendukung *smart city* Kabupaten Sukoharjo meliputi:

1. Pengembangan infrastruktur pendukung pariwisata meliputi pembangunan *amenitas* (kelengkapan) destinasi wisata, pembangunan ikon Kabupaten Sukoharjo dan pembangunan tampak muka gerbang Kabupaten Sukoharjo;



2. Pengembangan infrastruktur pendukung perekonomian meliputi pengembangan pasar tradisional, industri kreatif dan UMKM;
3. Pengembangan infrastruktur fasilitas publik meliputi pengembangan sarana transportasi terpadu yang mengutamakan transportasi massal, jalan, jembatan, gedung, irigasi, drainase dan saluran air bersih;
4. Pemasangan CCTV on line di tempat-tempat strategis dan ATCS di simpang ber traffic light;
5. Pengembangan infrastruktur fasilitas kesehatan;
6. Penataan kawasan permukiman yang meliputi perumahan dan kawasan kumuh;
7. Pengembangan dan penambahan fasilitas pengelolaan sampah;
8. Pengembangan energi terbarukan;
9. Penyediaan ruang publik, taman ramah anak, ruang terbuka hijau dan sarana olahraga;

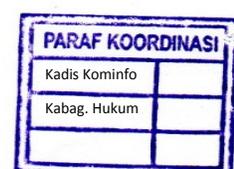
B. Rencana pengembangan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pengembangan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi pendukung *smart city* Kabupaten Sukoharjo meliputi:

1. Pengembangan insfrastruktur jaringan

Untuk mendukung *smart city* dibutuhkan pengembangan infrastruktur jaringan yang meliputi:

- a. Pembangunan *Smart Building*, Gedung perkantoran terpadu 10 lantai yang dilengkapi dengan fasilitas teknologi informasi yang terintegrasi dan pemanfaatan teknologi bangunan gedung yang ramah lingkungan (*Green Building*)
- b. Pengembangan jaringan *Suko-net*
Pada saat ini jaringan *Suko-net* sudah menjangkau seluruh Perangkat Daerah, kecamatan, desa dan kelurahan, perlu dikembangkan lagi jaringan yang menjangkau seluruh puskesmas, UPTD dan sekolah yang ada di Kabupaten Sukoharjo secara intranet dan internet;
- c. Peningkatan kapasitas *bandwith*;
- d. Pengembangan jaringan *free hotspot* untuk area publik;
- e. Penguatan sistem keamanan jaringan secara perangkat lunak dan perangkat keras.



- f. Penguatan sistem keamanan informasi secara perangkat lunak dan perangkat keras.
2. Pengembangan Sukoharjo *City Operation Center*
Kelompok pengembangan Sukoharjo *City Operation Center* meliputi:
 - a. Pengembangan perangkat keras, perangkat lunak dan pendukung lainnya
 - b. Pengembangan *Network Operation Center*
 - c. Pengembangan sistem keamanan
 - d. Pengembangan konfigurasi jaringan
 - e. Pengembangan *Disaster Recovery Center*
 - f. Pengembangan *Colocation* dan *Cloud Server*
 3. Pengembangan sarana dan prasarana pendukung
Kelompok pengembangan sarana dan prasarana pendukung meliputi:
 - a. Pembangunan Sukoharjo *Command Center*
 - b. Peningkatan kapasitas SDM
 - c. Pengembangan perangkat dan sistem pemantauan CCTV
 - d. Pengembangan sistem telepon ekstensi berbasis VoIP semua OPD
 - e. Penyediaan sarana akses informasi masyarakat

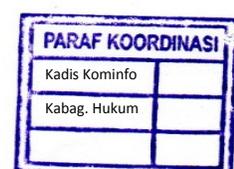
4.3 Rencana Pengembangan Aplikasi dan Perangkat Lunak Pendukung *Smart City*

Rencana pengembangan aplikasi dan perangkat lunak pendukung *smart city* meliputi:

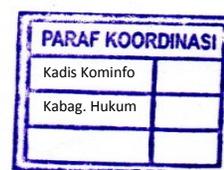
A. Pengembangan aplikasi layanan publik

Pengembangan aplikasi layanan publik meliputi:

1. Pengembangan aplikasi berbagi pakai (*interoperabilitas*) antar Perangkat Daerah;
2. Penguatan Layanan Pengaduan LAPORBUP SUKOHARJO yang terintegrasi dengan berbagai kanal akses yaitu: Aplikasi LAPOR SP4N, SMS Gateway, website, telepon, surat, media online dan media sosial (twitter, facebook, whatsapp, Instagram).
3. Pengembangan Layanan Publikasi Informasi yang meliputi:



- a. Penguatan website portal.sukoharjokab.go.id
 - b. Penguatan subdomain OPD, subdomain layanan, subdomain uptd dan subdomain desa.
 - c. Penguatan sistem PPID.
 - d. Penguatan Sistem pemberdayaan KIM (Kelompok Informasi Masyarakat).
 - e. Pengembangan dan operasional Layanan Informasi melalui Kanal Digital (Youtube), Sistem Live Streaming, Radio.
4. Pengembangan Sistem Informasi Ketataruangan.
 5. Pengembangan Aplikasi Layanan Informasi berbasis GIS.
 6. Pengembangan Aplikasi kepariwisataan
 7. Pengembangan call center kegawat-daruratan.
 8. Pengembangan Layanan Perizinan terintegrasi berbasis web dan mobile.
 9. Pengembangan layanan pendidikan terintegrasi
 10. Pengembangan layanan ketenagakerjaan.
 11. Pengembangan layanan pajak dan retribusi daerah terintegrasi.
 12. Pengembangan Sistem Informasi Potensi Produksi Pangan Daerah
 13. Pengembangan layanan kepegawaian terintegrasi dengan e-kinerja.
 14. Pengembangan layanan EWS (Early Warning System)
 15. Pengembangan layanan kesehatan yang meliputi:
 - a. Pengembangan Aplikasi Pendaftaran online pasien ke Rumah Sakit dan Puskesmas di Sukoharjo
 - b. Pengembangan Layanan Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu
 - c. Pengembangan sistem e-Puskesmas
 - d. Pengembangan sistem e-Gizi-KIA
 - e. Pengembangan integrasi layanan jaminan kesehatan dengan layanan kesehatan
 16. Pengembangan Layanan Administrasi Kependudukan
 17. Pengembangan Layanan Perpustakaan dan Kearsipan berbasis teknologi informasi.
 18. Pengembangan layanan open data
 19. Pengembangan Single Data Statistik
 20. Pengembangan aplikasi keuangan terintegrasi



21. Pengembangan Single Window aplikasi layanan publik dalam satu portal berbasis web dan mobile.

B. Pengembangan aplikasi layanan pemerintahan

1. Penguatan sistem open government terintegrasi meliputi eMusrenbang, *ePlanning*, *eBudgeting*, eRUP (Rencana Umum Pengadaan), *eProcurement* dan *eMonev*
2. Penguatan sistem *open government* desa terintegrasi meliputi eMusrenbang, ePlanning, eBudgeting, e-swakelola dan eMonev
3. Pengembangan sistem informasi eksekutif dan dashboard layanan publik terintegrasi berbasis web dan *mobile*.
4. Pengembangan administrasi e-Office
5. Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian berbasis web dan *mobile* yang terintegrasi

C. Pengembangan Sukoharjo *Smart System Platform*, yang meliputi:

1. modul dasar *smart system*.
2. Modul integrasi data dan informasi
3. Sistem *datawarehouse*.
4. Modul sistem pengambilan keputusan
5. Modul data dan informasi analitis.

D. Pengembangan Sistem Informasi Desa PIDEKSO (Pangkalan Informasi Desa) yang terintegrasi:

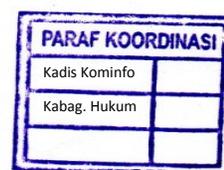
1. Aplikasi SKUTER (Pelayanan Surat Keterangan) Desa yang meliputi Surat Keterangan Umum, Surat Keterangan Kelahiran dan Surat Keterangan Kematian
2. Informasi Produk UMKM desa
3. Website desa.id untuk masing-masing desa
4. Sistem Informasi APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa)

E. Pengembangan aplikasi kewilayahan berbasis GIS

1. Pengembangan sistem e-Bencana terintegrasi
 - a. Pengembangan Penanganan Bahaya Kebakaran.
 - b. Pembangunan *Operating Room* Kebencanaan.
 - c. Peningkatan sensor EWS



- d. Implementasi *Disaster Recovery Management*.
2. Sistem Informasi Potensi Daerah Berbasis GIS
3. Pengembangan e-Lingkungan Hidup, meliputi:
 - a. Pengembangan sistem RTH dan RTLH
 - b. Pengembangan Sistem Persampahan.
 - c. Pengembangan sistem monitoring dan reporting data lingkungan hidup Sukoharjo
4. Sistem Kepariwisata, meliputi:
 - a. Pengembangan Sistem Informasi Pariwisata berbasis web dan mobile terintegrasi dengan GIS.
 - b. Pengelolaan promosi lokasi tujuan wisata memanfaatkan teknologi informasi.
 - c. Pengembangan ekosistem *e-tourism*
5. Sistem Transportasi, yang meliputi:
 - a. Pengembangan ATCS (*Area Traffic Control System*)
 - b. Pengembangan sistem administrasi parkir.
 - c. Pengembangan sistem informasi pengujian kendaraan bermotor.
 - d. Pengembangan sistem informasi PJU
6. Sistem Perekonomian
 - a. Pengembangan sistem e-UMKM dan Koperasi meliputi:
 - Sistem pendataan UKM, UMKM dan koperasi berbasis GIS.
 - Sistem monitoring UKM, UMKM dan koperasi berbasis GIS.
 - Sistem pengelolaan bantuan UKM, UMKM dan koperasi berbasis GIS.
 - b. Pengembangan sistem pengelolaan administrasi dan retribusi pasar tradisional.
7. Sistem Pertanian dan Perikanan, meliputi:
 - a. Pengembangan sistem pemasaran produk pertanian dan perikanan menggunakan teknologi informasi
 - b. Pengembangan sistem informasi pertanian dan perikanan (harga produk di tingkat petani/peternak, luas lahan, produktivitas, sistem tanam dan panen, sebaran jenis dan jumlah produk) berbasis GIS.



4.4 Rencana Penguatan *Smart City* Daerah

Terkait dengan rencana aksi *smart city* Kabupaten Sukoharjo, maka literasi dapat diterjemahkan sebagai segala usaha untuk memahami dan berkomunikasi dengan berbagai sarana baik kepada masyarakat maupun kepada Perangkat Daerah sendiri tentang implementasi *smart city* di Kabupaten Sukoharjo. Adapun rencana penguatan *smart city* Kabupaten Sukoharjo adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi melalui Kelompok Informasi Masyarakat, forum komunikasi kelompok sosial maupun jaringan informasi lain yang sudah ada.
2. Melakukan penyebarluasan informasi terkait *smart city* melalui produksi konten di media massa baik *online* dan *offline*, serta media sosial tentang gerakan pengembangan *smart city*, program dan tahapan implementasinya.
3. Pelatihan pengelolaan web subdomain
4. Pelatihan pengelolaan Aplikasi Aduan
5. Pelatihan PPID
6. Sosialisasi Sukoharjo *Smart City*
7. Sosialisasi *Masterplan* Sukoharjo *Smart City*
8. Pelatihan pengembangan *website*
9. Pelatihan jaringan komputer
10. Pelatihan keamanan Sistem Informasi
11. Pelatihan aplikasi berbasis *mobile*
12. Pelatihan aplikasi-aplikasi yang dibangun
13. Pelatihan pengelolaan data sektoral



BAB V

PETA JALAN PEMBANGUNAN *SMART CITY*

5.1 Quick Win Tahun 2018

Pada tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Sukoharjo menetapkan *Quick Win* yaitu PIDEKSO (Pangkalan Informasi Desa Sukoharjo) yang beralamat di <http://pidekso.sukoharjokab.go.id/> yaitu Pusat Informasi Data pokok desa di Kabupaten Sukoharjo dalam satu jangkauan. Meliputi data : Potensi desa, kemiskinan, pendidikan, kesehatan, kependudukan, pembangunan desa, pembangunan kawasan pedesaan, keuangan, ekonomi, sosial budaya, pemerintah desa, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan lain-lain sesuai kebutuhan data desa yang mencerminkan data terpilih.

Latar Belakang dari pemilihan PIDEKSO ini adalah adanya permasalahan terkait data pokok desa diantaranya:

1. Pemohon data desa harus datang ke kantor desa terkait pada waktu hari dan jam kerja
2. Pemohon data desa belum pasti dapat informasi yang diinginkannya karena belum tersedianya dokumentasi data pokok desa yang lengkap
3. Terkadang data pokok desa tersebut dikuasai atau melekat kepada individu Aparatur Pemerintah Desa, sehingga bila individu tersebut tidak ada di kantor maka data tidak dapat tersedia.
4. Aparatur Pemerintah Desa harus membuka dokumentasi data pokok desa apabila terdapat permohonan data
5. Aparatur Pemerintah Desa harus memberikan keterangan tambahan terkait dokumentasi data pokok desa apabila terdapat permohonan data
6. Belum tersedianya dokumentasi data pokok desa yang lengkap dan valid
7. Belum tersedianya sarana bagi Pemerintah Desa untuk transparansi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Desa.

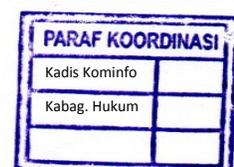


Adapun rincian dari Aplikasi PIDEKSO ini adalah sebagai berikut:

No	Program Kerja / Tujuan / Sasaran / Indikator Keberhasilan / Kesesuaian dengan RPJMD	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Tahun Pelaksanaan
1	<p>Program Kerja : Pengembangan Sistem Informasi Desa yaitu PIDEKSO (Pangkalan Informasi Desa Sukoharjo) http://pidekso.sukoharjokab.go.id/</p> <p>Tujuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan fasilitas bagi Pemerintah Desa dalam memberikan layanan informasi bagi yang membutuhkan 2. Untuk transparansi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Desa 3. Menyediakan kompilasi data desa yang valid. 4. Mempermudah proses layanan informasi dari yang sebelumnya manual dan harus datang langsung ke kantor desa terkait menjadi <i>online</i> 5. Mempercepat waktu proses layanan informasi dari yang sebelumnya membutuhkan waktu berjam-jam menjadi tersedia setiap saat. 6. Menyediakan data produk dan promosi pemasaran UMKM <p>Sasaran</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa 2. Pemerintah Desa 3. Kecamatan 4. Masyarakat 	APBD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa 2. Dinas Komunikasi dan Informatika 3. Pemerintah Desa 4. Pemerintah Kecamatan 	2018



No	Program Kerja / Tujuan / Sasaran / Indikator Keberhasilan / Kesesuain dengan RPJMD	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Tahun Pelaksanaan
	<p>Indikator Keberhasilan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya 12 jenis data pokok desa yang valid, meliputi data: Potensi desa, kemiskinan, pendidikan, kesehatan, kependudukan, pembangunan desa, pembangunan kawasan pedesaan, keuangan, ekonomi, sosial budaya, pemerintah desa dan lain-lain sesuai kebutuhan data desa yang mencerminkan data terpilah. 2. Tersedianya kompilasi 12 jenis data pedesaan di tingkat kecamatan dan kabupaten 3. Tersedianya media bagi desa untuk memberikan akses informasi bagi masyarakat 4. Tersedianya data pokok desa yang dapat diakses dari mana saja dan kapan saja 5. Tersedianya data pokok desa setiap saat. 6. Tersedianya informasi data produk dan promosi pemasaran UMKM 7. Masyarakat dapat memperoleh informasi data pokok desa dari mana saja dan kapan saja <p>Kesesuaian dengan RPJPD (Sasaran Pembangunan):</p> <p>Sesuai dengan Misi pertama yaitu Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien.</p> <p>Tujuan poin b. yaitu Meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan keterbukaan informasi publik 2. Mendorong masyarakat untuk 			

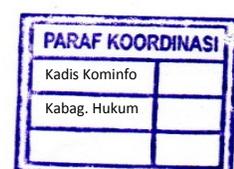


No	Program Kerja / Tujuan / Sasaran / Indikator Keberhasilan / Kesesuain dengan RPJMD	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Tahun Pelaksanaan
	dapat mengakses informasi publik dan memanfaatkannya			

Tabel 1 Quick Win Tahun 2018

Rencana Pengembangan dari aplikasi PIDEKSO adalah sebagai berikut:

1. PIDEKSO di tahun berikutnya akan dikembangkan versi *mobile* berbasis Android sehingga lebih mudah diakses oleh masyarakat
2. PIDEKSO akan diintegrasikan dengan *website* desa (setiap desa di Kabupaten Sukoharjo telah mempunyai *website* desa.id)
3. PIDEKSO akan diintegrasikan dengan aplikasi SKUTER (Surat Keterangan yang dikeluarkan Pemerintah Desa yang berupa SKALA (Surat Keterangan Lahir) SKAK (Surat Keterangan Kematian) dan SURPENG (Surat Pengantar) yang sudah terintegrasi dengan data kependudukan di Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo)
4. PIDEKSO akan dikembangkan menjadi *One-Stop Digital Services* Desa)di Kabupaten Sukoharjo

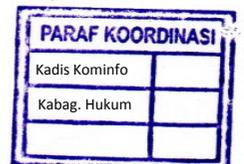


5.2 Jangka Pendek : 2019

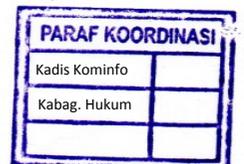
a. Smart governance

Sasaran *smart governance* yaitu mewujudkan tata kelola dan tata pamong pemerintahan daerah yang efektif, efisien, komunikatif, dan terus melakukan peningkatan kinerja birokrasi melalui inovasi dan adopsi teknologi yang terpadu.

No	RPJMD	Tujuan	Program Kerja	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Dinas Terkait	Waktu Pelaksanaan
1	Misi ke 2: Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat	Tujuan ke 2: Meningkatkan kualitas layanan publik	Penataan Administrasi Kependudukan	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Catatan Sipil (Penguatan Aplikasi layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil berbasis <i>online</i>)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatnya layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dari 4 hari menjadi 3 hari. ▪ Meningkatnya kuantitas layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dari 69% menjadi 72% ▪ Terbangunnya aplikasi layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil berbasis <i>mobile</i> ▪ Masyarakat dapat mengajukan layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil secara online berbasis <i>mobile</i> 	APBD	Dispendukc apil	DPMD Diskominfo	2019



No	RPJMD	Tujuan	Program Kerja	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Dinas Terkait	Waktu Pelaksanaan
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Pengembangan Sistem Informasi Desa	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedianya 12 jenis data pedesaan yang valid ▪ Tersedianya kompilasi 12 jenis data pedesaan di tingkat kecamatan dan kabupaten ▪ Tersedianya media bagi desa untuk memberikan akses informasi bagi masyarakat melalui http://pidekso.sukoharjokab.go.id 	APBD	DPMD Diskominfo Pemerintah Desa	Kecamatan, Desa	2019
2	Misi ke 2 : Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat	Tujuan ke 2 : Meningkatkan kualitas layanan publik	Pelayanan Perizinan Daerah	Penyusunan Sistem Tehnologi Informasi Pelayanan Perizinan (Penguatan Aplikasi Layanan perizinan dan non perizinan berbasis website dan mobil)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Masyarakat dapat mengajukan permohonan perizinan dan non perizinan dengan lebih mudah dan dari mana saja (<i>online</i>); ▪ Pemohon dapat mengetahui sampai dimana proses perizinan yang diajukan; ▪ Masyarakat dapat memperoleh dokumen perizinan dan non perzinan lebih cepat 	APBD	DPMPTSP DisKominfo	DPUPR, SatpolPP	2019



No	RPJMD	Tujuan	Program Kerja	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Dinas Terkait	Waktu Pelaksanaan
3	Misi ke 2 : Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat	Tujuan ke 2 : Meningkatkan kualitas layanan publik	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa	Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi (Integrasi Aplikasi Layanan Publik)	<ul style="list-style-type: none"> Integrasi aplikasi pelayanan kependudukan dengan aplikasi: <ol style="list-style-type: none"> pidekso.sukoharjokab.go.id aplikasi data difabel Sistem Informasi Puskesmas 	APBD	Diskominfo	Semua Perangkat Daerah	2019
4	Misi ke 2: Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat	Tujuan ke 2: Meningkatkan kualitas layanan publik	Pendidikan Menengah Pertama (Penguatan Sistem Pendaftaran Peserta Didik Baru secara Online)	Melaksanakan Penerimaan Siswa Baru	<ul style="list-style-type: none"> Terkelolanya Sistem Pendaftaran Peserta Didik Baru secara <i>Online</i> 	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2019
5	Misi ke 2 : Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat	Tujuan ke 2 : Meningkatkan kualitas layanan publik	Peningkatan Kesempatan Kerja	Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja (Penguatan Aplikasi GOJOB)	<ul style="list-style-type: none"> Informasi bursa tenaga kerja dikelola dalam aplikasi GOJOB 	APBD	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2019



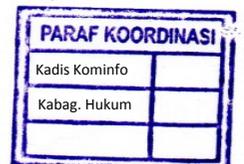
No	RPJMD	Tujuan	Program Kerja	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Dinas Terkait	Waktu Pelaksanaan
6	Misi ke 2 : Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat	Tujuan ke 2 : Meningkatkan kualitas layanan publik	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Pemeliharaan Basisdata PBB-P2 (Penguatan Sistem pajak dan retribusi daerah)	<ul style="list-style-type: none"> • Basis data PBB-P2 terpelihara keterkinian dan akurasi 	APBD	Badan Keuangan Daerah	Diskominfo	2019
7	Misi ke 3: Memperkuat Kemandirian Ekonomi Daerah dengan Menggerakkan Sektor Unggulan Daerah	Tujuan ke 1: Mewujudkan Ketahanan Pangan	Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian	Pengembangan Sistem Informasi Potensi Produksi Pangan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Database Potensi Produksi Pangan Daerah sudah dapat dijalankan oleh Dinas Pangan • Adanya Sistem Informasi Potensi Produksi Pangan Daerah dan dapat dioperasikan sesuai kebutuhan • Sistem Informasi Potensi Produksi Pangan Daerah terpeliharaan keterkinian datanya 	APBD	Dinas Pangan	Dinas Pertanian dan Perikanan	2019



No	RPJMD	Tujuan	Program Kerja	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Dinas Terkait	Waktu Pelaksanaan
8	Misi ke 1: Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Transparan	Tujuan ke 2 : Meningkatkan Partisipasi Publik dalam Proses Pengambilan Kebijakan Publik	Perencanaan Pembangunan Daerah	Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Program dan Kebijakan Layanan Publik (Penguatan aplikasi untuk <i>open government (e-planning)</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Prosentase aspirasi masyarakat yang ditindaklanjuti dari 50% menjadi 60% 	APBD	BAPPELBA NGDA BKD DISKOMINFO	Semua Perangkat Daerah	2019
9	Misi ke 1: Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Transparan	Tujuan ke 1: Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas	Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Pembuatan kebijakan tentang tanda tangan digital	<ul style="list-style-type: none"> • Disahkannya peraturan bupati tentang tanda tangan digital • Adanya landasan hukum yang disahkan oleh Bupati terhadap layanan publik yang dilaksanakan melalui sistem elektronik 	APBD	Dinas Komunikasi dan Informatika Bagian Hukum Setda Bagian Organisasi Setda DPMPTSP Dispendukcapil	Semua Perangkat Daerah	2019

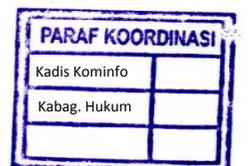


No	RPJMD	Tujuan	Program Kerja	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Dinas Terkait	Waktu Pelaksanaan
10	Misi ke 1: Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Transparan	Tujuan ke 1: Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas		Pembuatan kebijakan tentang integrasi aplikasi layanan publik	<ul style="list-style-type: none"> Disahkannya peraturan bupati tentang integrasi aplikasi layanan publik Adanya landasan hukum yang disahkan oleh Bupati terhadap integrasi aplikasi layanan publik 	APBD	Semua Perangkat Daerah	Semua Perangkat Daerah	2019
11	Misi ke 1: Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Transparan	Tujuan ke 1: Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pembangunan Gedung Kantor (Pengembangan kantor pemerintahan terpadu berbasis smart buliding)	<ul style="list-style-type: none"> Tersedianya kantor pemerintahan terpadu berbasis <i>building automatic system</i> yaitu gedung yang didukung oleh infrastruktur terpusat dan terkontrol 	APBD	Sekretariat Daerah	Dinas PUPR	2019
12	Misi ke 2 : Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat	Tujuan ke 2 : Meningkatkan kualitas layanan publik	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Penguatan aplikasi keuangan daerah	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan aplikasi keuangan melalui integrasi dengan aplikasi <i>e-planning, e-budgeting, e-monev</i> dan <i>sp2d online</i> 	APBD	Badan Keuangan Daerah	Semua Perangkat Daerah	2019
13	Misi ke 2 : Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat	Tujuan ke 2 : Meningkatkan kualitas layanan publik	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	Penguatan aplikasi keuangan desa	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan aplikasi keuangan desa melalui integrasi dengan pidekso.sukoharjokab.go.id 	APBD	Bagian Pemerintahan Desa	Kecamatan, Desa	2019



No	RPJMD	Tujuan	Program Kerja	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Dinas Terkait	Waktu Pelaksanaan
14	Misi ke 2 : Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat	Tujuan ke 2 : Meningkatkan kualitas layanan publik	Pengelolaan Pertanyaan Keluhan dan Saran Masyarakat Berbasis Teknologi Informasi	Peningkatan partisipasi publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi	<ul style="list-style-type: none"> Prosentase tindak lanjut aduan masyarakat multikanal dari 50% menjadi 60% 	APBD	DISKOMIN FO	Semua Perangkat Daerah	2019

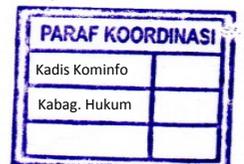
Tabel 1
Peta Jalan Jangka Pendek *Smart Governance*



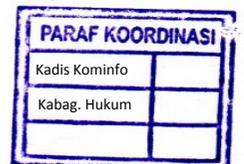
b. *Smart branding*

Smart branding memiliki sasaran untuk peningkatan daya saing daerah dengan penataan wajah kota dan pemasaran potensi daerah baik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional.

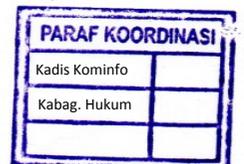
No	RPJMD	Tujuan	Program Kerja	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Dinas Terkait	Waktu Pelaksanaan
1	Misi ke 4: Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama dan Bermasyarakat	Tujuan ke 2: Mewujudkan pelestarian seni dan budaya daerah sebagai identitas lokal	Pengembangan Destinasi Pariwisata	Pengembangan Daerah Tujuan Pariwisata (Pengembangan wisata berbasis potensi desa)	Tersedianya master plan pengembangan wisata berbasis potensi desa	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan DPMD	Kecamatan, Desa	2019
				Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> Tersedianya kajian kebijakan standar amenities pendukung pariwisata Terpetakannya data kebutuhan amenities pendukung pariwisata 	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas PUPR	2019
2	Misi ke 4: Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama dan Bermasyarakat	Tujuan ke 2: Mewujudkan pelestarian seni dan budaya daerah sebagai identitas lokal	Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Pengembangan Sistem Informasi pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> Sistem informasi pariwisata dapat digunakan oleh masyarakat atau <i>stakeholder</i> terkait Terupdatenya Sistem Informasi Pariwisata 	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	2019



No	RPJMD	Tujuan	Program Kerja	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Dinas Terkait	Waktu Pelaksanaan
				Penyebarluasan informasi wisata	<ul style="list-style-type: none"> • Prosentase obyek wisata yang diinformasikan atau dipromosikan yaitu 100% 	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Komunikasi dan Informatika	Bagian Humas	2019
3	Misi ke 3 : Memperkuat Kemandirian Ekonomi Daerah dengan Menggerakkan Sektor Unggulan Daerah	Tujuan ke 4: Mewujudkan Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi	Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil dan Menengah	Pengembangan industri kreatif	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya kajian kebijakan pengembangan industri kreatif, kuliner asli, produk UMKM dan produk khas desa wisata • Terpetakannya data industri kreatif, kuliner asli, produk UMKM dan produk khas desa wisata • Meningkatnya jumlah pelaku industri kreatif 0.02% dibanding 2018 	APBD	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM	Dinas Perindustriandan Tenaga Kerja	2019
4	Misi ke 3 : Memperkuat Kemandirian Ekonomi Daerah dengan Menggerakkan Sektor Unggulan Daerah	Tujuan ke 4: Mewujudkan Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi	Pengembangan Sistem Pendukung Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Pengembangan Sistem Informasi Bisnis Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya Sistem informasi bisnis daerah yang dapat digunakan oleh masyarakat atau stakeholder terkait • Terupdatenya Sistem Informasi Bisnis Daerah 	APBD	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM	Dinas Perindustriandan Tenaga Kerja	2019

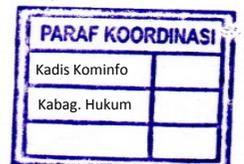


No	RPJMD	Tujuan	Program Kerja	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Dinas Terkait	Waktu Pelaksanaan
				Penyebarluasan informasi industri kreatif, kuliner asli, produk UMKM dan produk khas desa wisata	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya sarana penyebarluasan informasi industri kreatif, kuliner asli, produk UMKM dan produk khas desa wisata yaitu media massa, web dan media sosial • Meningkatnya transaksi UMKM dan produk khas desa wisata 5% dibanding 2018 	APBD	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Dinas Komunikasi dan Informatika Bagian Humas	Bagian Humas	2019
5	Misi ke 3 : Memperkuat Kemandirian Ekonomi Daerah dengan Menggerakkan Sektor Unggulan Daerah	Tujuan ke 4: Mewujudkan Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi	Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Pengawasan Pemanfaatan Ruang (Penataan wajah kota)	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya kegiatan penegakan Peraturan Daerah RTRW • Penertiban dan pembersihan sampah visual • Penataan reklame eksisting dan perizinan reklame 	APBD	Bappelbangda DPUPR DPKP	Satpol PP	2019



No	RPJMD	Tujuan	Program Kerja	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Dinas Terkait	Waktu Pelaksanaan
6	Misi ke 3 : Memperkuat Kemandirian Ekonomi Daerah dengan Menggerakkan Sektor Unggulan Daerah	Tujuan ke 4: Mewujudkan Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi	Pemanfaatan Ruang	Pengembangan kawasan pintu masuk	• Pentaan kawasan pintu masuk Kabupaten Sukoharjo	APBD	DPUPR DPKP	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2019
				Pengembangan ikon Kabupaten Sukoharjo	• Terlaksananya kerjasama dari seluruh pihak yaitu pemerintah, dunia bisnis, akademisi dan masyarakat dalam mempromosikan ikon Kabupaten Sukoharjo	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	DPUPR, DPKP	2019

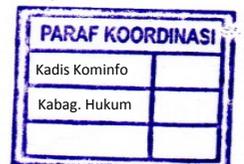
Tabel 2
Peta Jalan Jangka Pendek *Smart Branding*



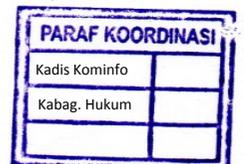
c. *Smart economy*

Sasaran *smart economy* adalah untuk mewujudkan ekosistem yang mendukung aktifitas ekonomi masyarakat yang selaras dengan sektor ekonomi unggulan daerah yang adaptif terhadap perubahan di era informasi saat ini, serta meningkatkan *financial literacy* masyarakat melalui berbagai program diantaranya mewujudkan *less-cash society*.

No	RPJMD	Tujuan	Program Kerja	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Dinas terkait	Waktu Pelaksana
1	Misi ke 3 : Memperkuat Kemandirian Ekonomi Daerah dengan Menggerakkan Sektor Unggulan Daerah	Tujuan ke 4 : Mewujudkan Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang katalog daerah	<ul style="list-style-type: none"> Disahkannya Peraturan Bupati tentang katalog daerah Tersedianya dasar hukum yang disahkan oleh Bupati tentang katalog daerah 	APBD	BKD DISDAGKOP & UKM	Bagian Hukum	2019
2	Misi ke 2 : Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat	Tujuan ke 2 : Meningkatkan kualitas layanan publik	Program Pelayanan Perizinan Daerah	Penyusunan Sistem Tehnologi Informasi Pelayanan Perizinan	<ul style="list-style-type: none"> Tersedianya Sistem Infomasi Perizinan Online yang dilengkapi dengan sistem <i>tracking</i> atas perizinan yang telah diajukan 	APBD	DPMPSTP	DisKominfo	2019
3	Misi ke 3 : Memperkuat Kemandirian Ekonomi Daerah dengan Menggerakkan Sektor Unggulan Daerah	Tujuan ke 4 : Mewujudkan Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil dan Menengah	Pengembangan e-commerce Kabupaten Sukoharjo	<ul style="list-style-type: none"> Tersusunnya dokumen perencanaan <i>e-commerce</i> daerah Tersedianya Sistem Informasi <i>e-commerce</i> daerah 	APBD	DISDAGKOP & UKM Diskominfo	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	2019



No	RPJMD	Tujuan	Program Kerja	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Dinas terkait	Waktu Pelaksanaan
4	Misi ke 3 : Memperkuat Kemandirian Ekonomi Daerah dengan Menggerakkan Sektor Unggulan Daerah	Tujuan ke 3 : Mewujudkan Penguatan Iklim Investasi	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Penyebarluasan informasi potensi dan investasi daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Prosentase Penyebarluasan informasi potensi dan investasi daerah melalui web http://sukoharjokab.go.id http://disdagkopumkm.sukoharjokab.go.id Sebesar 100% • Prosentase Penyebarluasan informasi potensi dan investasi daerah melalui akun media sosial resmi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM sebesar 100% • Prosentase penyebaran informasi potensi dan investasi daerah melalui sarana banner elektrik di beberapa titik strategis sebesar 100% 	APBD	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Dinas Komunikasi dan Informatika Bagian Humas	Bagian Humas	2019



No	RPJMD	Tujuan	Program Kerja	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Dinas terkait	Waktu Pelaksanaan
5	Misi ke 3 : Memperkuat Kemandirian Ekonomi Daerah dengan Menggerakkan Sektor Unggulan Daerah	Tujuan ke 4 : Mewujudkan Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Pembangunan Sistem Informasi Perencanaan Pengembangan Perkoperasian	<ul style="list-style-type: none"> Tersedianya Sistem Informasi perencanaan pengembangan perkoperasian Prosentase update data pada Sistem Informasi perencanaan pengembangan perkoperasian sebesar 75% 	APBD	DISDAGKOP & UKM	Bagian Perekonomian	2019
6	Misi ke 3 : Memperkuat Kemandirian Ekonomi Daerah dengan Menggerakkan Sektor Unggulan Daerah	Tujuan ke 4 : Mewujudkan Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil dan Menengah	Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi Hasil produksi	<ul style="list-style-type: none"> Prosentase penyempurnaan data UMKM sebesar 75% Prosentase updating database UMKM sebesar 75% 	APBD	DISDAGKOP & UKM	Bagian Perekonomian	2019
7	Misi ke 3 : Memperkuat Kemandirian Ekonomi Daerah dengan Menggerakkan Sektor Unggulan Daerah	Tujuan ke 4 : Mewujudkan Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Peningkatan transaksi non tunai	<ul style="list-style-type: none"> Bertambahnya pasar tradisional yang mengimplementasikan retribusi non tunai dari 2 menjadi 3 	APBD	DISDAGKOP & UKM	Diskominfo, Bank	

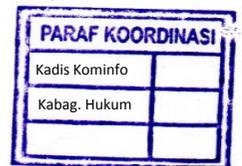
Tabel 3

Peta Jalan Jangka Pendek *Smart Economy*

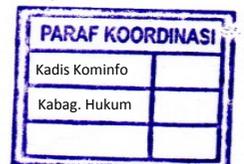
d. *Smart Living*

Untuk mewujudkan lingkungan tempat tinggal yang layak ada tiga elemen yang digunakan sebagai tolok ukur diantaranya kehidupan yang harmoni, kehidupan yang sehat dan didukung oleh alat transportasi untuk mendukung mobilitas orang dan barang.

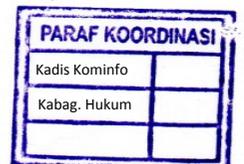
No	RPJMD	Tujuan	Program Kerja	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Dinas Terkait	Waktu Pelaksanaan
1	Misi ke 2: Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat	Tujuan ke 3: Mewujudkan pemenuhan pelayanan dasar publik	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Peningkatan sistem informasi tata ruang berbasis GIS	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya sistem informasi tata ruang berbasis GIS • Prosentase <i>update</i> sistem informasi tata ruang berbasis GIS sebesar 75% 	APBD	DPKP	Bappelbangda	2019
2	Misi ke 2: Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat	Tujuan ke 3: Mewujudkan pemenuhan pelayanan dasar publik	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Peningkatan informasi dan kesadaran kepada publik tentang RTH dan RTLH	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya sistem informasi RTH dan RTLH • Prosentase ketersediaan data RTH dan RTLH sebesar 75% 	APBD	DPUPR DPKP	DLH	2019



No	RPJMD	Tujuan	Program Kerja	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Dinas Terkait	Waktu Pelaksanaan
3	Misi ke 3: Memperkuat Kemandirian Ekonomi Daerah dengan Menggerakkan Sektor Unggulan Daerah	Tujuan ke 2: Mewujudkan Pelestarian Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam (Pengembangan sistem informasi area rawan bencana)	<ul style="list-style-type: none"> Tersedianya informasi area rawan bencana yang mudah di akses oleh masyarakat melalui http://bpbd.sukoharjokab.go.id 	APBD	BPBD	Diskominfo	2019
4	Misi ke 2: Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat	Tujuan ke 1: Meningkatkan kualitas layanan publik	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Kegawat Daruratan Medis Bagi Masyarakat (Pengembangan SPGDT (Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu) PSC 119)	<ul style="list-style-type: none"> Tersedianya aplikasi SPGDT PSC 119 Prosentase update aplikasi SPGDT PSC 119 sebesar 45% 	APBD	DKK	RSU & Faskes di Kabupaten Sukoharjo Diskominfo	2019



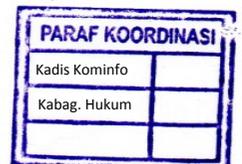
No	RPJMD	Tujuan	Program Kerja	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Dinas Terkait	Waktu Pelaksanaan
				Penguatan Aplikasi Pendaftaran online pasien ke rumah sakit dan puskesmas di sukoharjo	<ul style="list-style-type: none"> • Prosentase pengelolaan Aplikasi Pendaftaran online pasien ke rumah sakit dan puskesmas di sukoharjo sebesar 45% • Prosentase penyebaran informasi cara mendaftarkan pasien melalui http://sukoharjokab.go.id dan http://rsud.sukohariokab.go.id dan akun media sosial resmi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dan RSUD Kabupaten Sukoharjo sebesar 100% 	APBD	DKK RSUD RS di Kabupaten Sukoharjo	RSU & Faskes di Kabupaten Sukoharjo Diskominfo	2019
5	Misi ke 2: Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat	Tujuan ke 3: Mewujudkan pemenuhan pelayanan dasar publik	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Pengadaan Traficlight dan Rambu-rambu Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> • Berkurangnya prosentase waktu antrian kendaraan di persimpangan Apil (alat penanda isyarat lalu-lintas) sebesar 40% • Bertambahnya jangkauan pantauan dan pengawasan kondisi lalu lintas • Prosentase pelaksanaan edukasi edukasi kepada masyarakat sebesar 75% 	APBD	Dishub	Dishub	2019



No	RPJMD	Tujuan	Program Kerja	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Dinas Terkait	Waktu Pelaksanaan
6	Misi ke 2: Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat	Tujuan ke 3: Mewujudkan pemenuhan pelayanan dasar publik	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor	<ul style="list-style-type: none"> • Prosentase Terkelolanya sistem informasi manajemen pengujian kendaraan bermotor (SIM PKB) sebesar 100% • Prosentase Terupdatenya database SIM PKB sebesar 100% 	APBD	Dishub	Dishub	2019

Tabel 4

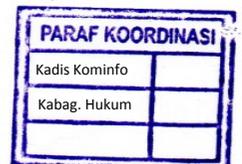
Peta Jalan Jangka Pendek *Smart Living*



e. *Smart Society*

Smart society menitikberatkan manusia sebagai unsur utama dalam suatu daerah dengan adanya ekosistem sosio teknis yang menunjukkan pergerakan antara dimenfisik dan virtual yang terjalin lebih intens. Hal tersebut menyebabkan terjadinya interaksi sosial yang tanpa batas dan tanpa sekat antar manusia dengan pemanfaatan teknologi informasi.

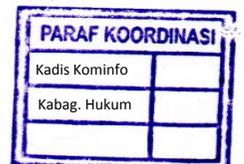
No	RPJMD	Tujuan	Program Kerja	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Dinas Terkait	Waktu Pelaksanaan
1	Misi ke 2 : Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat	Tujuan ke 2 : Mengurangi ketimpangan antar kelompok ekonomi masyarakat	Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Pengembangan Sistem Informasi Difabel	Prosentase penyusunan database dan sistem informasi difabel sebesar 75%	APBD	Dinas Sosial	Diskominfo	2019
2	Misi ke 2 : Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat	Tujuan ke 2 : Mengurangi ketimpangan antar kelompok ekonomi masyarakat	Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Daerah	Pengembangan kelompok inklusi	Jumlah kelompok atau sanggar inklusi yang terfasilitasi yaitu 1 kelompok	APBD	Dinas Sosial	Bagian Kesejahteraan Rakyat	2019
3	Misi ke 4 : Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama dan Bermasyarakat.	Tujuan ke 1: Mewujudkan fasilitas Kerukunan Kehidupan Beragama	Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan	Peningkatan Sosial Keagamaan	Prosentase terselenggaranya ceramah agama dan peringatan hari besar keagamaan sebesar 100%	APBD	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Bagian Umum	2019



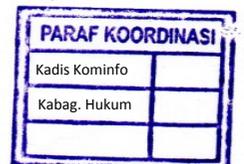
No	RPJMD	Tujuan	Program Kerja	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Dinas Terkait	Waktu Pelaksanaan
4	Misi ke 4 : Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama dan Bermasyarakat.	Tujuan ke 2: Mewujudkan pelestarian seni dan budaya daerah sebagai identitas lokal	Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	Peningkatan kualitas hidup manusia dan masyarakat	Terfasilitasinya kegiatan cabang olahraga di masyarakat	APBD	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	2019
5	Misi ke 4 : Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama dan Bermasyarakat.	Tujuan ke 2: Mewujudkan pelestarian seni dan budaya daerah sebagai identitas lokal	Pengembangan Nilai Budaya	Pengembangan Nilai Budaya	Terbinanya kelompok kesenian dan budaya sebanyak 20 kelompok	APBD	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2019
6	Misi ke 2 : Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat	Tujuan ke 2 : Mengurangi ketimpangan antar kelompok ekonomi masyarakat	Peningkatan Kesempatan Kerja	Pengembangan sistem informasi lowongan tenaga kerja	Prosentase pengelolaan sistem informasi lowongan tenaga kerja sebesar 100%	APBD	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	2019



No	RPJMD	Tujuan	Program Kerja	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Dinas Terkait	Waktu Pelaksanaan
7	Misi ke 1: Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Transparan	Tujuan ke 2: Meningkatkan Partisipasi Publik dalam Proses Pengambilan Kebijakan Publik	Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Pengembangan Jaringan Informasi Publik	Prosentase pengelolaan jaringan informasi publik sebesar 90%	APBD	Diskominfo Bagian Humas	Semua Perangkat Daerah	2019
8	Misi ke 2 : Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat	Tujuan ke 2 : Mengurangi ketimpangan antar kelompok ekonomi masyarakat	Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Daerah	Pengembangan Jaringan Pengaman Sosial	Terfasilitasinya Orang Terlantar dan Kehabisan Bekal dan Terbantunya Penduduk miskin yang meninggal Dunia sebanyak 3600 orang	APBD	Dinas Sosial	Bagian Kesejahteraan Rakyat	2019
9	Misi ke 2 : Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat	Tujuan ke 2 : Mengurangi ketimpangan antar kelompok ekonomi masyarakat	Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Hukum bagi Korban Kekerasan terhadap Perempuan	Prosentase pendampingan korban kekerasan terhadap perempuan sebesar 100%	APBD	DPPKBP3A	Bagian Hukum	2019



No	RPJMD	Tujuan	Program Kerja	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Dinas Terkait	Waktu Pelaksanaan
10	Misi ke 2 : Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat	Tujuan ke 1: Meningkatkan kualitas layanan publik	Keluarga Berencana	Pembinaan Keluarga Berencana	Terlaksananya kegiatan pembinaan keluarga berencana sebanyak 7 kegiatan	APBD	DPPKBP3A	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kecamatan, Desa	2019
11	Misi ke 2 : Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat	Tujuan ke 2 : Mengurangi ketimpangan antar kelompok ekonomi masyarakat	Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Peningkatan gemar membaca berbasis aplikasi	<ul style="list-style-type: none"> • Prosentase update aplikasi gemar membaca sebesar 100% • Prosentase terpeliharanya sarana dan buku perpustakaan sebesar 100% 	APBD	Disarpus	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2019
12	Misi ke 2 : Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat	Tujuan ke 2 : Mengurangi ketimpangan antar kelompok ekonomi masyarakat	Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Pengembangan aplikasi pengelolaan arsip	Prosentase <i>update</i> aplikasi pengelolaan arsip sebesar 100%	APBD	Disarpus	Semua Perangkat Daerah	2019

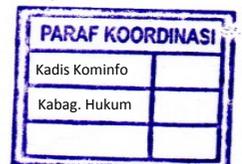


No	RPJMD	Tujuan	Program Kerja	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Dinas Terkait	Waktu Pelaksanaan
13	Misi ke 5: Mewujudkan Kondisi Masyarakat yang Tentram, Aman dan Dinamis	Tujuan ke 1: Mewujudkan lingkungan yang kondusif bagi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Tersedianya Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan sebanyak 176 orang	APBD	SATPOL PP	Kantor Kebanglinmas	2019
14	Misi ke 5: Mewujudkan Kondisi Masyarakat yang Tentram, Aman dan Dinamis	Tujuan ke 1: Mewujudkan lingkungan yang kondusif bagi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Pengembangan aplikasi one panic button	Tersedianya kajian kebijakan pengembangan <i>one panic button</i>	APBD	SATPOL PP	BPBD, Kepolisian	2019



No	RPJMD	Tujuan	Program Kerja	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Dinas Terkait	Waktu Pelaksanaan
15	Misi ke 5: Mewujudkan Kondisi Masyarakat yang Tentram, Aman dan Dinamis	Tujuan ke 1: Mewujudkan lingkungan yang kondusif bagi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Pengembangan aplikasi EWS Early Warning System	Tersedianya kajian kebijakan pengembangan aplikasi EWS (<i>Early Warning System</i>)	APBD	BPBD	Diskominfo	2019

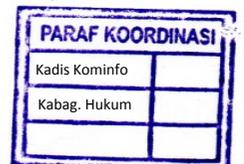
Tabel 5

Peta Jalan Jangka Pendek *Smart Society*

f. *Smart Environment*

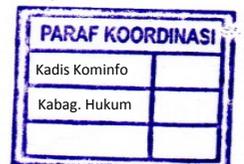
Smart environment memiliki sasaran untuk mewujudkan tata kelola lingkungan hidup Kabupaten Sukoharjo yang baik, bertanggung-jawab, dan berkelanjutan.

No	RPJMD	Tujuan	Program Kerja	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Dinas Terkait	Waktu Pelaksanaan
1	Misi ke 3 : Memperkuat Kemandirian Ekonomi Daerah dengan Menggerakkan Sektor Unggulan Daerah	Tujuan ke 2: Mewujudkan Pelestarian Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana;	Peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> Tersedianya informasi kinerja lingkungan hidup yang dapat diakses oleh masyarakat melalui website Dinas Lingkungan Hidup (www.dlh.sukoharjokab.go.id) Prosentase Update Informasi kinerja lingkungan setiap tahun sebesar 100% Tercapainya penghargaan Nirwasitantra dari Presiden Indonesia 	APBD	Dinas Lingkungan Hidup	BPS Dinas Pertanian dan Perikanan	2019
2	Misi ke 3 : Memperkuat Kemandirian Ekonomi Daerah dengan Menggerakkan Sektor Unggulan Daerah	Tujuan ke 2: Mewujudkan Pelestarian Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana;	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahanPengembang an Bank Sampah dan TPS3R) Bimbingan Teknis Persampahan Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya jumlah bank sampah (saat ini 62 buah, tahun 2019 menjadi 70 buah Meningkatnya kinerja 5 TPS3R (Tempat Pembuangan Sampah Sementara Reduce, Recycle dan Reuse) beserta pengelolanya saat ini prosentase kinerja 50% diharapkan menjadi 60%. Terlaksananya Bimbingan Teknis Persampahan. Setiap tahun 50 peserta 	APBD	Dinas Lingkungan Hidup	DPMD, Kecamatan, Kelurahan dan Desa	2019



No	RPJMD	Tujuan	Program Kerja	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Dinas Terkait	Waktu Pelaksanaan
3	Misi ke 3 : Memperkuat Kemandirian Ekonomi Daerah dengan Menggerakkan Sektor Unggulan Daerah	Tujuan ke 2: Mewujudkan Pelestarian Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana;	Penyusunan aplikasi Data base Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Penyusunan aplikasi Data base Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya jumlah industry/perusahaan penghasil LB3 yang membuat laporan dari 30 perusahaan di 2018 menjadi 40 perusahaan di tahun 2019 Jumlah izin Tempat penyimpanan sementara Limbah B3 yang diterbitkan bertambah 10 buah izin 	APBD	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	2019
4	Misi ke 3 : Memperkuat Kemandirian Ekonomi Daerah dengan Menggerakkan Sektor Unggulan Daerah	Tujuan ke 2: Mewujudkan Pelestarian Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana;	Perlindungan konservasi Sumber Daya alam	Pengendalian Dampak Perubahan Iklim (Pengembangan kampung iklim)	<ul style="list-style-type: none"> Bertambah 1 rintisan kampung iklim di Kabupaten Sukoharjo Menurunnya emisi GRK sebanyak 2 % Tercapainya penghargaan Proklamasi utama dari Kementerian LHK Meningkatnya jumlah kunjungan studi banding dan peserta edukasi di Kampung Iklim dari 1086 peserta di tahun 2017 menjadi 3000 peserta di tahun 2019 	APBD	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Pertanian & Perikanan, DKK, Dinas Pangan, DPMD, Kecamatan, Kelurahan dan Desa	2019

Tabel 6

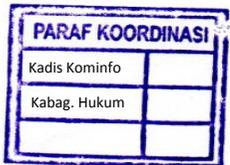
Peta Jalan Jangka Pendek *Smart Environment*

5.1. Jangka Menengah : 2019 – 2024

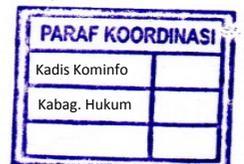
a. Smart governance

Sasaran smart governance yaitu mewujudkan tata kelola dan tata pamong pemerintahan daerah yang efektif, efisien, komunikatif, dan terus melakukan peningkatan kinerja birokrasi melalui inovasi dan adopsi teknologi yang terpadu.

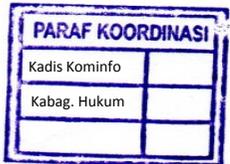
No	RPJMD	Tujuan	Program Kerja	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Dinas Terkait	2020	2021	2022	2023	2024
1	Misi ke 2: Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat	Tujuan ke 2: Meningkatkan kualitas layanan publik	Penataan Administrasi Kependudukan	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Catatan Sipil (Penguatan Aplikasi layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil berbasis online)	Pengurusan KTP (hari)	APBD	Dispendukcapil	DPMD Diskominfo	3	3	3	3	3
					Pengurusan Akta Kelahiran (hari)			DPMD Diskominfo	2	2	2	2	2
					Pengurusan Akta Kematian (hari)			DPMD Diskominfo	2	2	2	2	2



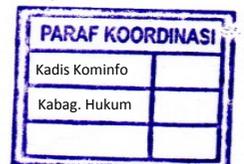
No	RPJMD	Tujuan	Program Kerja	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Dinas Terkait	2020	2021	2022	2023	2024
2	Misi ke 2: Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat	Tujuan ke 2: Meningkatkan kualitas layanan publik	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Pengembangan Sistem Informasi Desa	Prosentase update Sistem Informasi Desa	APBD	DPMD Diskominfo Pemerintah Desa	Kecamatan, Desa	100%	100%	100%	100%	100%
3	Misi ke 2 : Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat	Tujuan ke 2 : Meningkatkan kualitas layanan publik	Pelayanan Perizinan Daerah	Penyusunan Sistem Tehnologi Informasi Pelayanan Perizinan (Penguatan Aplikasi Layanan perizinan dan non perizinan berbasis website dan mobile)	Prosentase pengelolaan Aplikasi Layanan perizinan dan non perizinan berbasis <i>website</i> dan <i>mobile</i>	APBD	DPMPTSP	DisKominfo	100%	100%	100%	100%	100%
4	Misi ke 2 : Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat	Tujuan ke 2 : Meningkatkan kualitas layanan publik	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa	Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi (Integrasi Aplikasi Layanan Publik)	Prosentase integrasi aplikasi layanan publik yang sudah ada	APBD	Diskominfo	Semua Perangkat Daerah	50%	75%	100%	100%	100%



No	RPJMD	Tujuan	Program Kerja	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Dinas Terkait	2020	2021	2022	2023	2024
5	Misi ke 2: Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat	Tujuan ke 2: Meningkatkan kualitas layanan publik	Pendidikan Menengah Pertama (Penguatan Sistem Pendaftaran Peserta Didik Baru secara Online)	Melaksanakan Penerimaan Siswa Baru	Prosentase Terkelolanya Sistem Pendaftaran Peserta Didik Baru secara <i>Online</i>	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	100%	100%	100%	100%	100%
6	Misi ke 2 : Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat	Tujuan ke 2 : Meningkatkan kualitas layanan publik	Peningkatan Kesempatan Kerja	Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja (Penguatan Aplikasi GOJOB)	Prosentase <i>update</i> Aplikasi GOJOB	APBD	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	100%	100%	100%	100%	100%
7	Misi ke 2 : Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat	Tujuan ke 2 : Meningkatkan kualitas layanan publik	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Pemeliharaan Basisdata PBB-P2 (Penguatan Sistem pajak dan retribusi daerah)	Prosentase Terkelolanya Aplikasi PBB & BPHTB	APBD	Badan Keuangan Daerah	Diskominfo	100%	100%	100%	100%	100%

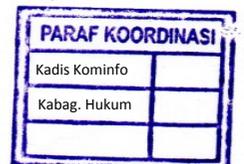


No	RPJMD	Tujuan	Program Kerja	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Dinas Terkait	2020	2021	2022	2023	2024
8	Misi ke 3: Memperkuat Kemandirian Ekonomi Daerah dengan Menggerakkan Sektor Unggulan Daerah	Tujuan ke 1: Mewujudkan Ketahanan Pangan	Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian	Pengembangan Sistem Informasi Potensi Produksi Pangan Daerah	Prosentase update Sistem Informasi Potensi Produksi Pangan Daerah	APBD	Dinas Pangan	Dinas Pertanian dan Perikanan	50%	75%	100%	100%	100%
9	Misi ke 1: Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Transparan	Tujuan ke 2 : Meningkatkan Partisipasi Publik dalam Proses Pengambilan Kebijakan Publik	Perencanaan Pembangunan Daerah	Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Program dan Kebijakan Layanan Publik (Penguatan aplikasi untuk <i>open government (e-planning)</i>)	Jumlah aspirasi masyarakat yang tertindaklanjuti (kecamatan)	APBD	BAPPELBANGDA BKD DISKOMINFO	Semua Perangkat Daerah	12	12	12	12	12
10	Misi ke 2 : Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat	Tujuan ke 2 : Meningkatkan kualitas layanan publik	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Penguatan aplikasi keuangan daerah	Prosentase Terkelolanya aplikasi keuangan daerah	APBD	Badan Keuangan Daerah	Semua Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%



No	RPJMD	Tujuan	Program Kerja	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Dinas Terkait	2020	2021	2022	2023	2024
11	Misi ke 2 : Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat	Tujuan ke 2 : Meningkatkan kualitas layanan publik	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	Penguatan aplikasi keuangan desa	Prosentase Terkelolanya aplikasi keuangan desa	APBD	Bagian Pemerintahan Desa	Kecamatan, Desa	100%	100%	100%	100%	100%
12	Misi ke 2 : Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat	Tujuan ke 2 : Meningkatkan kualitas layanan publik	Pengelolaan Pertanyaan Keluhan dan Saran Masyarakat Berbasis Teknologi Informasi	Peningkatan partisipasi publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi	Prosentase aduan masyarakat melalui sistem aduan multi kanal dapat direspon dan ditindaklanjuti	APBD	DISKOMINFO	Semua Perangkat Daerah	75%	80%	85%	90%	100%

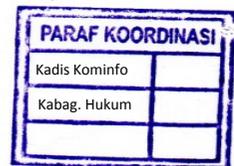
Tabel 7

Peta Jalan Jangka Menengah *Smart Governance*

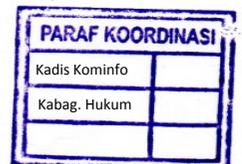
b. Smart branding

Smart branding memiliki sasaran untuk peningkatan daya saing daerah dengan penataan wajah kota dan pemasaran potensi daerah baik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional.

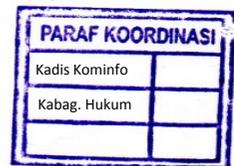
No	RPJMD	Tujuan	Program Kerja	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Dinas Terkait	2020	2021	2022	2023	2024
1	Misi ke 4: Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama dan Bermasyarakat	Tujuan ke 2: Mewujudkan pelestarian seni dan budaya daerah sebagai identitas lokal	Pengembangan Destinasi Pariwisata	Pengembangan Daerah Tujuan Pariwisata (Pengembangan wisata berbasis potensi desa)	Jumlah objek/destinasi yang dibangun /dikembangkan	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan DPMD	DPMD	0	1	0	1	0
					Jumlah kunjungan wisata (orang)	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan DPMD	Kecamatan, Desa	8177 5	8250 0	8300 0	8350 0	8400 0
				Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	Jumlah objek/destinasi yang direnovasi	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	DPUPR, DPKP	2	2	2	2	2



No	RPJMD	Tujuan	Program Kerja	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Dinas Terkait	2020	2021	2022	2023	2024
2	Misi ke 4: Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama dan Bermasyarakat	Tujuan ke 2: Mewujudkan pelestarian seni dan budaya daerah sebagai identitas lokal	Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Pengembangan Sistem Informasi pariwisata	Prosentase update Sistem Informasi pariwisata	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	50%	100%	100%	100%	100%
				Penyebarluasan informasi wisata	Prosentase penyebaran informasi wisata melalui multi kanal	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Komunikasi dan Informatika	Bagian Humas	100%	100%	100%	100%	100%
3	Misi ke 3 : Memperkuat Kemandirian Ekonomi Daerah dengan Menggerakkan Sektor Unggulan Daerah	Tujuan ke 4: Mewujudkan Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi	Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil dan Menengah	Pengembangan industri kreatif	Jumlah data industri kreatif, kuliner asli, produk UMKM dan produk khas desa wisata	APBD	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Dinas Perindustri dan Tenaga Kerja	Desa	370	370	370	370	370

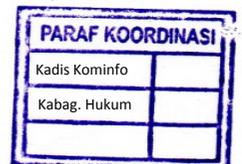


No	RPJMD	Tujuan	Program Kerja	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Dinas Terkait	2020	2021	2022	2023	2024
4	Misi ke 3 : Memperkuat Kemandirian Ekonomi Daerah dengan Menggerakkan Sektor Unggulan Daerah	Tujuan ke 4: Mewujudkan Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi	Pengembangan Sistem Pendukung Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Pengembangan Sistem Informasi Bisnis Daerah	Prosentase update Sistem Informasi Bisnis Daerah	APBD	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM	50%	100%	100%	100%	100%
				Penyebarluasan informasi industri kreatif, kuliner asli, produk UMKM dan produk khas desa wisata	Prosentase penyebaran informasi industri kreatif, kuliner asli, produk UMKM dan produk khas desa wisata melalui multi kanal	APBD	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Dinas Komunikasi dan Informatika Bagian Humas	Bagian Humas	100%	100%	100%	100%	100%
5	Misi ke 3 : Memperkuat Kemandirian Ekonomi Daerah dengan Menggerakkan Sektor Unggulan Daerah	Tujuan ke 4: Mewujudkan Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi	Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Pengawasan Pemanfaatan Ruang (Penataan wajah kota)	Penertiban dan pembersihan sampah visual serta Penataan reklame eksisting dan perizinan reklame	APBD	Bappelbangda DPUPR DPKP	Satpol PP	12	12	12	12	12



No	RPJMD	Tujuan	Program Kerja	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Dinas Terkait	2020	2021	2022	2023	2024
6	Misi ke 3 : Memperkuat Kemandirian Ekonomi Daerah dengan Menggerakkan Sektor Unggulan Daerah	Tujuan ke 4: Mewujudkan Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi	Pemanfaatan Ruang	Pengembangan kawasan pintu masuk	Pentaan kawasan pintu masuk Kabupaten Sukoharjo	APBD	DPUPR DPKP	Bappelbangda	1	1	1	1	1
				Pengembangan ikon Kabupaten Sukoharjo	Terlaksananya kerjasama dari seluruh pihak yaitu pemerintah, dunia bisnis, akademisi dan masyarakat dalam mempromosikan ikon Kabupaten Sukoharjo	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	DPUPR, DPKP	1	1	1	1	1

Tabel 8

Peta Jalan Jangka Menengah *Smart Branding*

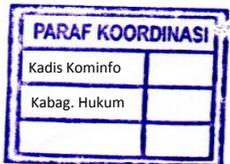
c. Smart economy

Sasaran smart economy adalah untuk mewujudkan ekosistem yang mendukung aktifitas ekonomi masyarakat yang selaras dengan sektor ekonomi unggulan daerah yang adaptif terhadap perubahan di era informasi saat ini, serta meningkatkan financial literacy masyarakat melalui berbagai program diantaranya mewujudkan less-cash society.

No	RPJMD	Tujuan	Program Kerja	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Dinas terkait	2020	2021	2022	2023	2024
1	Misi ke 3 : Memperkuat Kemandirian Ekonomi Daerah dengan Menggerakkan Sektor Unggulan Daerah	Tujuan ke 4 : Mewujudkan Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi	Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Pengembangan e-katalog daerah	Prosentase pengembangan aplikasi e-katalog daerah	APBD	BKD DISDAGKO P & UKM	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	75%	100%	100%	100%	100%
					Prosentase update tabel e-katalog daerah		BKD DISDAGKO P & UKM	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	0%	50%	75%	100%	100%
					Prosentase implementasi e-katalog daerah		BKD DISDAGKO P & UKM	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	0%	0%	50%	75%	100%

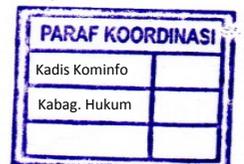


No	RPJMD	Tujuan	Program Kerja	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Dinas terkait	2020	2021	2022	2023	2024
2	Misi ke 2 : Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat	Tujuan ke 2 : Meningkatkan kualitas layanan publik	Program Pelayanan Perizinan Daerah	Penyusunan Sistem Tehnologi Informasi Pelayanan Perizinan	Prosentase implementasi layanan perizinan terintegrasi	APBD	DPMPTSP DisKominfo	DPUPR	100%	100%	100%	100%	100%
3	Misi ke 3 : Memperkuat Kemandirian Ekonomi Daerah dengan Menggerakkan Sektor Unggulan Daerah	Tujuan ke 4 : Mewujudkan Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil dan Menengah	Pengembangan <i>e-commerce</i> Kabupaten Sukoharjo	Prosentase update aplikasi <i>e-commerce</i>	APBD	DISDAGKO P & UKM Diskominfo	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	50%	100%	100%	100%	100%
4	Misi ke 3 : Memperkuat Kemandirian Ekonomi Daerah dengan Menggerakkan Sektor Unggulan Daerah	Tujuan ke 3 : Mewujudkan Penguatan Iklim Investasi	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Penyebarluasan informasi potensi dan investasi daerah	Prosentase update informasi potensi dan investasi daerah	APBD	Dinas Perdagangan dan UKM Dinas Komunikasi dan Informatika Bagian Humas	Bagian Humas	100%	100%	100%	100%	100%



No	RPJMD	Tujuan	Program Kerja	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Dinas terkait	2020	2021	2022	2023	2024
5	Misi ke 3 : Memperkuat Kemandirian Ekonomi Daerah dengan Menggerakkan Sektor Unggulan Daerah	Tujuan ke 4 : Mewujudkan Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Pembangunan Sistem Informasi Perencanaan Pengembangan Perkoperasian	Prosentase Update Sistem Informasi Perencanaan Pengembangan Perkoperasian	APBD	DISDAGKO P & UKM	DISDAGK OP & UKM	100%	100%	100%	100%	100%
6	Misi ke 3 : Memperkuat Kemandirian Ekonomi Daerah dengan Menggerakkan Sektor Unggulan Daerah	Tujuan ke 4 : Mewujudkan Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil dan Menengah	Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi Hasil produksi	Prosentase update aplikasi informasi UMKM	APBD	DISDAGKO P & UKM	DISDAGK OP & UKM	100%	100%	100%	100%	100%
7	Misi ke 3 : Memperkuat Kemandirian Ekonomi Daerah dengan Menggerakkan Sektor Unggulan Daerah	Tujuan ke 4 : Mewujudkan Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Peningkatan transaksi non tunai	Prosentase transaksi non tunai melalui e-retribusi pasar	APBD	DISDAGKO P & UKM	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	75%	100%	100%	100%	100%

Tabel 9

Peta Jalan Jangka Menengah *Smart Economy*

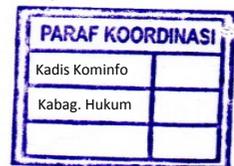
d. Smart Living

Untuk mewujudkan lingkungan tempat tinggal yang layak ada tiga elemen yang digunakan sebagai tolok ukur diantaranya kehidupan yang harmoni, kehidupan yang sehat dan didukung oleh alat transportasi untuk mendukung mobilitas orang dan barang.

No	RPJMD	Tujuan	Program Kerja	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Dinas Terkait	2020	2021	2022	2023	2024
1	Misi ke 2: Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat	Tujuan ke 3: Mewujudkan pemenuhan pelayanan dasar publik	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Peningkatan sistem informasi tata ruang berbasis GIS	Prosentase update sistem informasi tata ruang berbasis GIS	APBD	DPKP	Bappelbangda	100%	100%	100%	100%	100%
2	Misi ke 2: Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat	Tujuan ke 3: Mewujudkan pemenuhan pelayanan dasar publik	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Peningkatan informasi dan kesadaran kepada publik tentang RTH dan RTLH	Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan.	APBD	DPUPR DPKP	DLH	1	0	1	1	1
3	Misi ke 3: Memperkuat Kemandirian Ekonomi Daerah dengan Menggerakkan Sektor Unggulan Daerah	Tujuan ke 2: Mewujudkan Pelestarian Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam (Pengembangan sistem informasi area rawan bencana)	Prosentase update sistem informasi area rawan bencana	APBD	BPBD	Diskominfo	50%	75%	100%	100%	100%



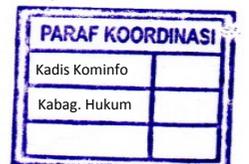
No	RPJMD	Tujuan	Program Kerja	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Dinas Terkait	2020	2021	2022	2023	2024
4	Misi ke 2: Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat	Tujuan ke 1: Meningkatkan kualitas layanan publik	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Kegawat Daruratan Medis Bagi Masyarakat (Pengembangan SPGDT (Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu) PSC 119)	Prosentase implementasi Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu) PSC 119	APBD	DKK	RSU & Faskes di Kabupaten Sukoharjo Diskominfo	50%	75%	100%	100%	100%
				Penguatan Aplikasi Pendaftaran online pasien ke rumah sakit dan puskesmas di sukoharjo	Prosentase update Aplikasi Pendaftaran online pasien ke rumah sakit dan puskesmas di sukoharjo	APBD	DKK RSUD RS di Kabupaten Sukoharjo	RSU & Faskes di Kabupaten Sukoharjo Diskominfo	50%	75%	100%	100%	100%
5	Misi ke 2: Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat	Tujuan ke 3: Mewujudkan pemenuhan pelayanan dasar publik	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Pengadaan Traficlight dan Rambu-rambu Lainnya	Prosentase Kelayakan Sarana Prasarana dan Fasilitas LLAJ	APBD	Dishub	Dishub	100%	100%	100%	100%	100%



No	RPJMD	Tujuan	Program Kerja	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Dinas Terkait	2020	2021	2022	2023	2024
6	Misi ke 2: Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat	Tujuan ke 3: Mewujudkan pemenuhan pelayanan dasar publik	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor	Prosentase update sistem informasi manajemen pengujian kendaraan bermotor (SIM PKB)	APBD	Dishub	Dishub	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 10

Peta Jalan Jangka Menengah *Smart Living*



e. Smart Society

Smart city menitikberatkan manusia sebagai unsur utama dalam suatu daerah dengan adanya ekosistem sosio teknis yang menunjukkan pergerakan antara dimenfisik dan virtual yang terjalin lebih intens. Hal tersebut menyebabkan terjadinya interaksi social yang tanpa batas dan tanpa sekat antar manusia dengan pemanfaatan teknologi informasi.

No	RPJMD	Tujuan	Program Kerja	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Dinas terkait	2020	2021	2022	2023	2024
1	Misi ke 2 : Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat	Tujuan ke 2 : Mengurangi ketimpangan antar kelompok ekonomi masyarakat	Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Pengembangan Sistem Informasi Difabel	Prosentase penyusunan database dan sistem informasi difabel	APBD	Dinas Sosial	Diskominfo	100%				
					Prosentase update sistem informasi difabel		Dinas Sosial	Diskominfo		100%	100%	100%	100%
2	Misi ke 2 : Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat	Tujuan ke 2 : Mengurangi ketimpangan antar kelompok ekonomi masyarakat	Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Daerah	Pengembangan kelompok inklusi	Jumlah kelompok atau sanggar inklusi	APBD	Dinas Sosial	Bagian Kesejahteraan Rakyat	1	1	1	1	1
3	Misi ke 4 : Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama dan Bermasyarakat.	Tujuan ke 1: Mewujudkan fasilitas Kerukunan Kehidupan Beragama	Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan	Peningkatan Sosial Keagamaan	Prosentase penyelenggaraan kegiatan sosial keagamaan	APBD	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Bagian Umum	100%	100%	100%	100%	100%



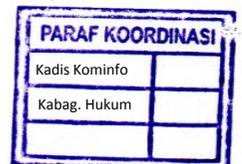
No	RPJMD	Tujuan	Program Kerja	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Dinas terkait	2020	2021	2022	2023	2024
4	Misi ke 4 : Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama dan Bermasyarakat.	Tujuan ke 2: Mewujudkan pelestarian seni dan budaya daerah sebagai identitas local	Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	Peningkatan kualitas hidup manusia dan masyarakat	Prosentase fasilitasi kegiatan 5 cabang olahraga di masyarakat	APBD	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	100%	100%	100%	100%	100%
5	Misi ke 4 : Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama dan Bermasyarakat.	Tujuan ke 2: Mewujudkan pelestarian seni dan budaya daerah sebagai identitas lokal	Pengembangan Nilai Budaya	Pengembangan Nilai Budaya	Terbinanya kelompok kesenian dan budaya sebanyak 20 kelompok	APBD	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Dinas Peneddikan dan Kebudayaan	100%	100%	100%	100%	100%
6	Misi ke 2 : Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat	Tujuan ke 2 : Mengurangi ketimpangan antar kelompok ekonomi masyarakat	Peningkatan Kesempatan Kerja	Pengembangan sistem informasi lowongan tenaga kerja	Prosentase pengelolaan sistem informasi lowongan tenaga kerja	APBD	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	100%	100%	100%	100%	100%



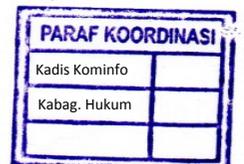
No	RPJMD	Tujuan	Program Kerja	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Dinas terkait	2020	2021	2022	2023	2024
7	Misi ke 1: Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Transparan	Tujuan ke 2: Meningkatkan Partisipasi Publik dalam Proses Pengambilan Kebijakan Publik	Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Pengembangan Jaringan Informasi Publik	Prosentase pengelolaan jaringan informasi publik	APBD	Diskominfo Bagian Humas	Semua Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%
8	Misi ke 2 : Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat	Tujuan ke 2 : Mengurangi ketimpangan antar kelompok ekonomi masyarakat	Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Daerah	Pengembangan Jaringan Pengaman Sosial	Terfasilitasinya Orang Terlantar dan Kehabisan Bekal dan Terbantunya Penduduk miskin yang meninggal Dunia	APBD	Dinas Sosial	Bagian Kesejahteraan Rakyat	3600	3600	3600	3600	3600
9	Misi ke 2 : Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat	Tujuan ke 2 : Mengurangi ketimpangan antar kelompok ekonomi masyarakat	Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Hukum bagi Korban Kekerasan terhadap Perempuan	Terlaksananya pendampingan korban kekerasan terhadap perempuan	APBD	DPPKBP3A	Bagian Hukum	100%	100%	100%	100%	100%
10	Misi ke 2 : Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat	Tujuan ke 1: Meningkatkan kualitas layanan public	Keluarga Berencana	Pembinaan Keluarga Berencana	Terlaksananya kegiatan pembinaan keluarga berencana	APBD	DPPKBP3A	DPMD	7	7	7	7	7



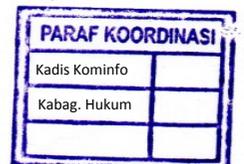
No	RPJMD	Tujuan	Program Kerja	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Dinas terkait	2020	2021	2022	2023	2024
11	Misi ke 2 : Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat	Tujuan ke 2 : Mengurangi ketimpangan antar kelompok ekonomi masyarakat	Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Peningkatan gemar membaca berbasis aplikasi	Prosentase update aplikasi gemar membaca	APBD	Disarpus	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	100%	100%	100%	100%	100%
12	Misi ke 2 : Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat	Tujuan ke 2 : Mengurangi ketimpangan antar kelompok ekonomi masyarakat	Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Pengembangan aplikasi pengelolaan arsip	Prosentase update aplikasi pengelolaan arsip	APBD	Disarpus	Semua Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%
13	Misi ke 5: Mewujudkan Kondisi Masyarakat yang Tenram, Aman dan Dinamis	Tujuan ke 1: Mewujudkan lingkungan yang kondusif bagi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Tersedianya Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	APBD	SATPOL PP	Kantor Kesbanglinmas	176	176	176	176	176



No	RPJMD	Tujuan	Program Kerja	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Dinas terkait	2020	2021	2022	2023	2024
				Pembinaan dan Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan Forum Kegiatan Sejenisnya dalam Upaya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Terlaksananya Pembinaan Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (bulan)	APBD	SATPOL PP	Kantor Kesbanglinmas	12	12	12	12	12
				Pengendalian Keamanan Lingkungan	Terkendalnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan dan Kondusifitas daerah serta tersedianga tenaga operasional (bulan)	APBD	SATPOL PP	Kantor Kesbanglinmas	12	12	12	12	12



No	RPJMD	Tujuan	Program Kerja	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Dinas terkait	2020	2021	2022	2023	2024
14	Misi ke 5: Mewujudkan Kondisi Masyarakat yang Tentram, Aman dan Dinamis	Tujuan ke 1: Mewujudkan lingkungan yang kondusif bagi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Pengembangan aplikasi one panic button	Prosentase penyusunan database dan aplikasi one pacic button	APBD	SATPOL PP	Kepolisian	100%				
					Prosentase terkelolanya aplikasi one panic button	APBD	SATPOL PP	Kepolisian		50%	75%	100%	100%
15	Misi ke 5: Mewujudkan Kondisi Masyarakat yang Tentram, Aman dan Dinamis	Tujuan ke 1: Mewujudkan lingkungan yang kondusif bagi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Pengembangan aplikasi EWS (<i>Early Warning System</i>)	Prosentase penyusunan database dan aplikasi EWS Early Warning System	APBD	BPBD	Diskominfo	100%				
					Prosentase terkelolanya aplikasi EWS	APBD	BPBD	Diskominfo		50%	75%	100%	100%



No	RPJMD	Tujuan	Program Kerja	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Dinas terkait	2020	2021	2022	2023	2024
					(Early Warning System)								

Tabel 11

Peta Jalan Jangka Menengah *Smart Society*

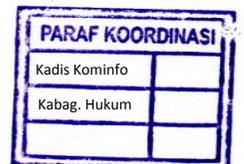
f. Smart Environment

Smart environment memiliki sasaran untuk mewujudkan tata kelola lingkungan hidup Kabupaten Sukoharjo yang baik, bertanggung-jawab, dan berkelanjutan.

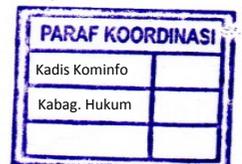
No	RPJMD	Tujuan	Program Kerja	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Dinas terkait	2020	2021	2022	2023	2024
1	Misi ke 3 : Memperkuat Kemandirian Ekonomi Daerah dengan Menggerakkan Sektor Unggulan Daerah	Tujuan ke 2: Mewujudkan Pelestarian Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana;	Peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan Lingkungan hidup	Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan	Prosentase ketersediaan informasi kinerja lingkungan hidup yang dapat diakses oleh masyarakat melalui website Dinas Lingkungan Hidup (www.dlh.sukoharjokab.go.id)	APBD	Dinas Lingkungan Hidup	BPS, Dinas Pertanian dan Perikanan	100%	100%	100%	100%	100%
					Prosentase update Informasi kinerja lingkungan setiap tahun	APBD	Dinas Lingkungan Hidup	BPS, Dinas Pertanian dan Perikanan	100%	100%	100%	100%	100%
					Tercapainya penghargaan Nirwasitantra dari Presiden Indonesia	APBD	Dinas Lingkungan Hidup	BPS, Dinas Pertanian dan Perikanan	1	1	1	1	1
2	Misi ke 3 : Memperkuat Kemandirian Ekonomi	Tujuan ke 2: Mewujudkan Pelestarian	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Jumlah bank sampah yang terbentuk di masyarakat tahun 2019 terbentuk 70 bank sampah	APBD	Dinas Lingkungan Hidup	DPMD, Kecamatan, Kelurahan dan Desa	74	78	82	86	90



No	RPJMD	Tujuan	Program Kerja	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Dinas terkait	2020	2021	2022	2023	2024
	Daerah dengan Menggerakkan Sektor Unggulan Daerah	Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana;											
					Prosentase kinerja 5 TPS3R (Tempat Pembuangan Sampah Sementara <i>Reduce, Recycle dan Reuse</i>) beserta pengelolanya Tahun 2019 kinerja 5 TPS3R 60%.	APBD	Dinas Lingkungan Hidup	DPMD, Kecamatan, Kelurahan dan Desa	65%	70%	75%	80%	85%
					Terlaksananya Bimbingan Teknis Persampahan. (peserta)	APBD	Dinas Lingkungan Hidup	DPMD, Kecamatan, Kelurahan dan Desa	50	50	50	50	50
				Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan	Jumlah penyuluhan/sosialisasi Pengelolaan Persampahan yang diadakan Dinas Lingkungan Hidup	APBD	Dinas Lingkungan Hidup	DPMD, Kecamatan, Kelurahan dan Desa	12 kali				
3	Misi ke 3 : Memperkuat Kemandirian Ekonomi Daerah dengan Menggerakkan Sektor Unggulan Daerah	Tujuan ke 2: Mewujudkan Pelestarian Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana;	Penyusunan aplikasi Data base Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun (B3)	Penyusunan aplikasi Data base Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun (B3)	Jumlah industry/perusahaan penghasil LB3 yang membuat laporan tahun 2019 sebanyak 40 perusahaan	APBD	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	45	50	55	60	65



No	RPJMD	Tujuan	Program Kerja	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Dinas terkait	2020	2021	2022	2023	2024
					Jumlah izin Tempat penyimpanan sementara Limbah B3 yang diterbitkan	APBD	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	10	10	10	10	10
4	Misi ke 3 : Memperkuat Kemandirian Ekonomi Daerah dengan Menggerakkan Sektor Unggulan Daerah	Tujuan ke 2: Mewujudkan Pelestarian Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana;	Perlindungan konservasi Sumber Daya alam	Pengendalian Dampak Perubahan Iklim (Pengembangan kampung iklim)	Jumlah rintisan kampung iklim baru	APBD	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Pertanian & Perikanan, DKK, Dinas Pangan, DPMD, Kecamatan, Kelurahan dan Desa	1	1	1	1	1
					Prosentase penurunan emisi GRK	APBD	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Pertanian & Perikanan, DKK, Dinas Pangan, DPMD, Kecamatan, Kelurahan dan Desa	2%	2%	2%	2%	2%
					Penghargaan Proklamasi utama dari Kementerian LHK	APBD	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Pertanian & Perikanan, DKK, Dinas Pangan, DPMD, Kecamatan,	1	1	1	1	1



No	RPJMD	Tujuan	Program Kerja	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Dinas terkait	2020	2021	2022	2023	2024
								Kelurahan dan Desa					
					Jumlah kunjungan studi banding dan peserta edukasi di Kampung Iklim tahun 2019 menjadi 3000 peserta	APBD	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Pertanian & Perikanan, DKK, Dinas Pangan, DPMD, Kecamatan, Kelurahan dan Desa	3500	4000	4500	5000	5500

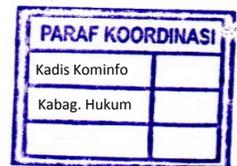
Tabel 12

Peta Jalan Jangka Menengah *Smart Environment*

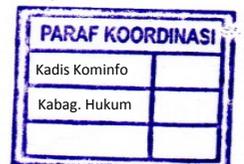
5.2. Jangka Panjang : sampai dengan tahun 2025

Sesuai dengan Rencana Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukoharjo yang dimulai pada tahun 2005 dan berakhir pada tahun 2025, maka Peta jalan jangka panjang Implementasi Smart City di Kabupaten Sukoharjo juga menyesuaikan sampai dengan tahun 2025.

No	Misi RPJPD	Sasaran RPJPD	Dimensi Smart City	Sasaran Smart City	Program Smart City	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Dinas Terkait
1	Mewujudkan tata pemerintahan yang baik (Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai	Smart governance	Meningkatkan kualitas layanan	Peningkatan pelayanan administrasi	APBD	Dispendukcapil	Desa, Kelurahan, Kecamatan,



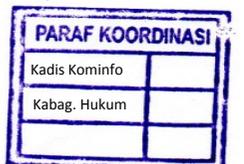
No	Misi RPJPD	Sasaran RPJPD	Dimensi Smart City	Sasaran Smart City	Program Smart City	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Dinas Terkait
	Good Governance) didukung oleh aparatur Pemerintah Daerah yang profesional bebas korupsi, kolusi dan nepotisme	dengan standar mutu pelayanan yang berorientasi pada terciptanya kepuasan masyarakat		publik (<i>Public Service</i>)	kependudukan berbasis <i>online</i> dan <i>mobile</i>			Diskominfo
2	Mewujudkan tata pemerintahan yang baik (<i>Good Governance</i>) didukung oleh aparatur Pemerintah Daerah yang profesional bebas korupsi, kolusi dan nepotisme	Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar mutu pelayanan yang berorientasi pada terciptanya kepuasan masyarakat	Smart governance	Meningkatkan kualitas layanan publik (<i>Public Service</i>)	Penguatan e-perizinan berbasis <i>online</i> dan <i>mobile</i>	APBD	DPMPSTP	Diskominfo
3	Mewujudkan tata pemerintahan yang baik (<i>Good Governance</i>) didukung oleh aparatur Pemerintah Daerah yang profesional bebas korupsi, kolusi dan nepotisme	Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar mutu pelayanan yang berorientasi pada terciptanya kepuasan masyarakat	Smart governance	Meningkatkan kualitas layanan publik (<i>Public Service</i>)	Penguatan e-desa	APBD	DPMD	Bagian Pemerintahan Desa dan Diskominfo
4	Mewujudkan tata pemerintahan yang baik (<i>Good Governance</i>) didukung oleh aparatur Pemerintah Daerah yang profesional bebas korupsi, kolusi dan nepotisme	Meningkatnya profesionalisme aparatur daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, beretika, dan bertanggung jawab serta mampu mendukung pembangunan	Smart governance	Meningkatkan efisiensi birokrasi (<i>Bureaucracy</i>)	Terlaksananya regulasi tata kelola pemerintahan berbasis <i>smart city</i>	APBD	DISKOMINFO	Semua Perangkat Daerah



No	Misi RPJPD	Sasaran RPJPD	Dimensi Smart City	Sasaran Smart City	Program Smart City	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Dinas Terkait
		daerah yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)						
5	Mewujudkan tata pemerintahan yang baik (<i>Good Governance</i>) didukung oleh aparatur Pemerintah Daerah yang profesional bebas korupsi, kolusi dan nepotisme	Meningkatnya profesionalisme aparatur daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, beretika, dan bertanggung jawab serta mampu mendukung pembangunan daerah yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)	<i>Smart governance</i>	Meningkatkan efisiensi kebijakan publik (<i>Public Policy</i>)	Penguatan aplikasi <i>open government</i>	APBD	Bappelbangda, BKD dan Semua Perangkat Daerah	Semua Perangkat Daerah
6	Terwujudnya pertumbuhan perekonomian masyarakat dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi unggulan daerah dan pemanfaatan sumber daya alam dalam konsteks pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada ekonomi	Meningkatnya perkembangan perindustrian, perdagangan, pariwisata, agrobisnis dan industrialisasi perdesaan serta sektor usaha lainnya yang dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat	Smart Branding	Membangun dan memasarkan ekosistem pariwisata (<i>Tourism Branding</i>)	Pengembangan wisata berbasis alam dan potensi desa	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	DPMD, Kecamatan, Desa



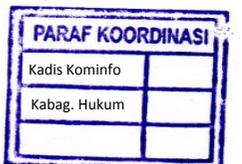
No	Misi RPJPD	Sasaran RPJPD	Dimensi Smart City	Sasaran Smart City	Program Smart City	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Dinas Terkait
	kerakyatan							
7	Terwujudnya pertumbuhan perekonomian masyarakat dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi unggulan daerah dan pemanfaatan sumber daya alam dalam konteks pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan	Meningkatnya perkembangan perindustrian, perdagangan, pariwisata, agrobisnis dan industrialisasi perdesaan serta sektor usaha lainnya yang dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat	Smart Branding	Membangun dan memasarkan ekosistem bisnis daerah (<i>Business Branding</i>)	Pengembangan industri kreatif, kuliner asli, produk UMKM dan produk khas desa wisata serta pemasarannya	APBD	Dinas Perindustrian dan UMKM	DPMD, Kecamatan, Desa
8	Terwujudnya pertumbuhan perekonomian masyarakat dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi unggulan daerah dan pemanfaatan sumber daya alam dalam konteks pembangunan yang berkelanjutan dan	Meningkatnya keterpeliharaan kekayaan keragaman jenis dan kekhasan sumber daya alam untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing, dan modal pembangunan daerah	Smart Branding	Membangun dan memasarkan ekosistem wajah kota (<i>City Appearance Branding</i>)	Penataan wajah kota	APBD	Dinas PUPR	DPKP



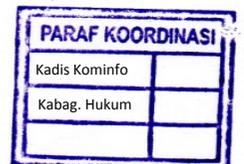
No	Misi RPJPD	Sasaran RPJPD	Dimensi Smart City	Sasaran <i>Smart City</i>	Program <i>Smart City</i>	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Dinas Terkait
	berorientasi pada ekonomi kerakyatan							
9	Terwujudnya pertumbuhan perekonomian masyarakat dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi unggulan daerah dan pemanfaatan sumber daya alam dalam konteks pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan	Meningkatnya pemanfaatan aset dan produk daerah yang berdaya saing tinggi sebagai sumber-sumber kekayaan daerah	<i>Smart Economy</i>	Membangun ekosistem ekonomi yang berdaya saing (<i>Industry</i>)	Peningkatan e-katalog daerah	APBD	Dinas Perindustrian dan UMKM	Bagian Pembangunan, Bagian Perekonomian
10	Terwujudnya pertumbuhan perekonomian masyarakat dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi unggulan daerah dan pemanfaatan sumber daya alam dalam konteks pembangunan yang berkelanjutan dan	Meningkatnya pemanfaatan aset dan produk daerah yang berdaya saing tinggi sebagai sumber-sumber kekayaan daerah	<i>Smart Economy</i>	Mewujudkan kesejahteraan rakyat (<i>Welfare</i>)	Peningkatan kapasitas koperasi dan UMKM	APBD	Dinas Perindustrian dan UMKM	Bagian Perekonomian



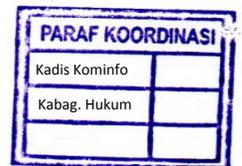
No	Misi RPJPD	Sasaran RPJPD	Dimensi Smart City	Sasaran Smart City	Program Smart City	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Dinas Terkait
	berorientasi pada ekonomi kerakyatan							
11	Terwujudnya pertumbuhan perekonomian masyarakat dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi unggulan daerah dan pemanfaatan sumber daya alam dalam konteks pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan	Meningkatnya pemanfaatan aset dan produk daerah yang berdaya saing tinggi sebagai sumber-sumber kekayaan daerah	Smart Economy	Membangun ekosistem transaksi keuangan (<i>Transaction</i>)	Peningkatan transaksi non tunai	APBD	Dinas Perindustrian dan UMKM	BKD
12	Terwujudnya pemerataan pembangunan melalui pengembangan wilayah yang didukung kelengkapan sarana dan prasarana penunjang aktifitas sosial ekonomi masyarakat	Meningkatnya keterpenuhan dan pemerataan kebutuhan prasarana dan sarana pelayanan dasar di seluruh wilayah perdesaan dan perkotaan dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	Smart Living	Harmonisasi tata ruang wilayah (<i>Harmony</i>)	Penngembangan aplikasi <i>Early Warning System</i>	APBD	BPBD	Diskominfo



No	Misi RPJPD	Sasaran RPJPD	Dimensi Smart City	Sasaran Smart City	Program Smart City	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Dinas Terkait
13	Terwujudnya kualitas sumberdaya manusia penggerak pembangunan yang produktif, cerdas, sehat, berbudaya dan religius	Meningkatnya perluasan pelayanan kesehatan	Smart Living	Mewujudkan prasarana kesehatan (<i>Health</i>)	Mengembangkan <i>e-health</i> (sistem kesehatan terpadu_ dan Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana kesehatan yang terpadu	APBD	DKK, RSU	Pelayanan kesehatan di Kabupaten Sukoharjo
14	Terwujudnya pemerataan pembangunan melalui pengembangan wilayah yang didukung kelengkapan sarana dan prasarana penunjang aktifitas sosial ekonomi masyarakat	Meningkatnya jaringan infrastruktur wilayah yang andal sehingga dapat meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas faktor-faktor yang mendukung berkembangnya aktivitas produksi dan mampu membuka isolasi daerah serta membentuk kawasan-kawasan pertumbuhan baru	Smart Living	Menjamin ketersediaan sarana transportasi (<i>Mobility</i>)	Mengembangkan <i>e-traffict</i> terpadu Dan Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana transportasi	APBD	Dishub	Diskominfo
15	Terwujudnya kondisi daerah yang aman, damai, tertib dan tenteram melalui penegakan supremasi hukum dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan	Meningkatnya rasa aman, damai, tertib dan tentram dalam perikehidupan masyarakat sebagai dampak dari penegakan supremasi hukum yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah	Smart Society	Mewujudkan Interaksi Masyarakat Yang Efisien (<i>Community</i>)	Pengembangan kabupaten inklusi	APBD	Dinas Sosial	Bagian Kesejahteraan Rakyat
16	Terwujudnya kualitas sumberdaya manusia penggerak pembangunan	Meningkatnya pemerataan pendidikan dan kesempatan memperoleh pendidikan	Smart Society	Membangun Ekosistem Belajar Yang Efisien	Pengembangan budaya gemar meBaca	APBD	Dinas Arsip dan Perpustakaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

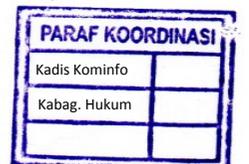


No	Misi RPJPD	Sasaran RPJPD	Dimensi Smart City	Sasaran <i>Smart City</i>	Program <i>Smart City</i>	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Dinas Terkait
	yang produktif, cerdas, sehat, berbudaya dan religius	yang layak		(<i>Learning</i>)				
17	Terwujudnya kondisi daerah yang aman, damai, tertib dan tenteram melalui penegakan supremasi hukum dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan	Meningkatnya rasa aman, damai, tertib dan tentram dalam perikehidupan masyarakat sebagai dampak dari penegakan supremasi hukum yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah	Smart Society	Mewujudkan Sistem Keamanan Masyarakat (<i>Security</i>)	Pengembangan aplikasi one panic button	APBD	Satpol PP	Kantor Kesbanglinmas
18	Terwujudnya pemerataan pembangunan melalui pengembangan wilayah yang didukung kelengkapan sarana dan prasarana penunjang aktifitas sosial ekonomi masyarakat	Meningkatnya keterpenuhan dan pemerataan kebutuhan prasarana dan sarana pelayanan dasar di seluruh wilayah perdesaan dan perkotaan dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	Smart Environment	Mengembangkan Program Proteksi Lingkungan (<i>Protection</i>)	Meningkatkan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	APBD	DLH	Kecamatan, Desa
19	Terwujudnya pemerataan pembangunan melalui pengembangan wilayah yang didukung	Meningkatnya keterpenuhan dan pemerataan kebutuhan prasarana dan sarana	Smart Environment	Mengembangkan Tata Kelola Sampah dan Limbah (<i>Waste</i>)	Meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha di Kabupaten Sukoharjo	APBD	DLH	Kecamatan, Desa



No	Misi RPJPD	Sasaran RPJPD	Dimensi Smart City	Sasaran Smart City	Program Smart City	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Dinas Terkait
	kelengkapan sarana dan prasarana penunjang aktifitas sosial ekonomi masyarakat	pelayanan dasar di seluruh wilayah perdesaan dan perkotaan dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat			dalam tata kelola limbah			
20	Terwujudnya pemerataan pembangunan melalui pengembangan wilayah yang didukung kelengkapan sarana dan prasarana penunjang aktifitas sosial ekonomi masyarakat	Meningkatnya keterpenuhan dan pemerataan kebutuhan prasarana dan sarana pelayanan dasar di seluruh wilayah perdesaan dan perkotaan dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	Smart Environment	Mengembangkan Tata Kelola Energi Yang Bertanggung-jawab (<i>Energy</i>)	Mengembangkan program pengendalian terhadap perubahan iklim	APBD	DLH	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kecamatan, Desa

Tabel 13

Peta Jalan Jangka Panjang *Smart City*

BAB VI

PENUTUP

Masterplan Pengembangan *Smart City* Kabupaten Sukoharjo disusun berdasarkan telaah Buku 1 Analisis Strategis *Smart City* Kabupaten Sukoharjo , yang merupakan bagian tak terpisahkan dari dokumen ini. Penyusunan masterplan juga telah mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 – 2021 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukoharjo tahun 2005 – 2025.

Dokumen ini diharapkan sebagai acuan dasar bagi pengambil keputusan untuk menyusun perencanaan dan pelaksanaan program serta kegiatan pembangunan di Kabupaten Sukoharjo selama kurun waktu 5 hingga 6 tahun mendatang sesuai kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah.

Penyempurnaan dokumen *masterplan* dapat dilakukan tanpa menunggu masa berakhirnya dokumen. Masterplan ini terbuka untuk direvisi sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo.

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA